



Cakrawala Kebangsaan

RUMAH BESAR CENDEKIAWAN

SAATNYA CENDEKIAWAN
BICARA

Prasetijono Widjojo MJ

PEMERINTAHAN PRABOWO DAN
DEMOKRASI PANCASILA

Nofia Fitri

GOOD GOVERNANCE
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
INDONESIA

Susetya Herawati

KEMANA SISTEM PENDIDIKAN
KITA AKAN DIBAWA?

Wisnu Broto

URGENSI HALUAN NEGARA
BAGI PEMBANGUNAN BANGSA
DAN NEGARA [NATION AND
STATE BUILDING

Pontjo Sutowo

KEADILAN: SARI PATI
KEMANUSIAAN

Ahmad Zacky Siradj

MENGURANGI FOOD LOSS DAN
FOOD WASTE UNTUK
MENINGKATKAN KETAHANAN
PANGAN NASIONAL

I Dewa Putu Rai

“POST PARLIAMENTARY
POLITICS”: MODEL ALTERNATIF
REPRESENTASI POLITIK

Manuel Kaisiepo



PENERBIT

Aliansi Kebangsaan

PEMIMPIN UMUM

Pontjo Sutowo

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Ahmad Zacky Siradj

PEMIMPIN REDAKSI

Ansel Da Lopez

SEKRETARIS REDAKSI

Nofia Fitri

DEWAN REDAKSI

I Putu Dewa Rai

Prasetijono Widjojo MJ

Manuel Kaisiepo

Wisnubroto Baron

REDAKTUR PELAKSANA

Nofia Fitri

Yuli Astuti Tyas

Irma Khairani

SEKRETARIAT

Nova Fitri

Indri Ayu

Cakrawala Kebangsaan

Rumah Besar Cendekiawan

SALAM KEBANGSAAN

Maju Terus Aliansi Kebangsaan

1

15 Tahun Aliansi Kebangsaan

4

OPINI

**Mengurangi Food Loss dan Food Waste untuk
Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional**

8

I Dewa Putu Rai

**“Post-Parliamentary Politics”: Model Alternatif
Representasi Politik**

14

Manuel Kaisiepo

**Kemana Sistem Pendidikan Nasional Kita akan
Dibawa?**

17

Wisnu Broto

**Urgensi Haluan Negara Bagi Pembangunan
Bangsa dan Negara (Nation and State Building)**

22

Pontjo Sutowo

Saatnya Cendekiawan Bicara

27

Prasetijono Widjojo MJ

Pemerintahan Prabowo dan Demokrasi Pancasila

31

Nofia Fitri

Keadilan : Sari Pati Kemanusiaan

34

Ahmad Zacky Siradj

Good Governance Kewirausahaan Indonesia

35

Susetya Herawati

NEWS

**Peluncuran Buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa
Indonesia?: Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara
sebagai Pandu Masa Depan**

41

**Testimoni Buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa
Indonesia?: Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara
sebagai Pandu Masa Depan**

45



MAJU TERUS ALIANSI KEBANGSAAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, Aliansi Kebangsaan yang telah melangkah maju penuh semangat sejak didirikan pada 28 Oktober 2010, kini genap berusia 15 tahun pada 28 Oktober 2025. Peringatan hari lahir ini bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-97. Momentum Sumpah Pemuda memiliki makna khusus, karena semangatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi inspirasi utama berdirinya Aliansi Kebangsaan.

Ibarat seorang manusia, usia 15 tahun terbilang masih muda dan masih harus banyak belajar. Namun, telah berada dalam proses menjadi dewasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk merawat kebangsaan Indonesia. Tentu tidak mudah karena bangsa ini begitu besar dan beraneka ragam, baik dalam suku, kepercayaan, dan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga banyak persoalan yang masih harus dihadapi. Belum lagi menyangkut proses penyelenggaraannya: baik di bidang hukum, politik, demokrasi dan sebagainya.

Lagi pula, kebangsaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terbentuk dan lahir secara alamiah, atau suatu proses sekali jadi. Bukan pula "*given*", melainkan sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik. Karena itu, kebangsaan kita dapat tumbuh subur atau layu, bahkan mati, sesuai perkembangan dan tuntutan keadaan. Karena itu

harus selalu dijaga, dipupuk, dan diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia.

Dengan ketekunan sampai usianya yang ke-15, banyak hal yang telah dilakukan Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPPi, HIPMI, Media Kompas, PPAD, dan beberapa mitra strategis lainnya, telah banyak kegiatan yang dilakukan untuk merawat kebangsaan. akan tetapi, semuanya tentu tidak berhenti di sini. Setelah 15 tahun, Aliansi Kebangsaan harus terus berjuang, bahkan harus semakin bersemangat.

Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, kebangsaan kita tidak luput dari berbagai ujian dan pasang-surutnya. Banyak pihak bahkan menengarai bahwa kebangsaan Indonesia belakangan ini justru sedang mengalami perapuhan. Oleh karena itu, selain mengucapkan Dirgahayu Aliansi Kebangsaan yang telah mencapai usia 15 tahun, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan Aliansi Kebangsaan ke depan? Melalui peringatan Hari Ulang Tahun ke-15, kesadaran kolektif bangsa berkaitan dengan kebangsaan Indonesia perlu digugah kembali. Selain masalah-masalah dalam negeri yang menumpuk, baik dalam masalah tata nilai, masalah pengelolaan bangsa dan negara, serta tata sejahtera untuk mengelola kekayaan nusantara yang begitu melimpah, membawa rakyat menjadi sejahtera yang

berkeadilan. Di atas semua ini, juga bagaimana menghadapi derasnya arus globalisasi dan berkembangnya konsep perang modern dewasa ini.

Kita tidak mungkin menghindar dari arus globalisasi dengan segala pengaruhnya, termasuk penetrasi kebudayaan yang begitu gencar, baik dengan cara damai maupun dengan kekerasan. Maka tidak terhindarkan masuknya aneka ragam paham/nilai/ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai ke-Indonesia-an. Globalisasi budaya sangat berbahaya karena dapat menghilangkan identitas seseorang atau suatu bangsa. Ranah budaya juga telah menjadi salah satu “medan pertempuran (*battle-field*)” dari konsep perang modern dewasa ini, yang antara lain meliputi penghancuran nilai, budaya, merusakkan moral generasi masa depan bangsa, ekonomi, politik, serta bidang kehidupan nasional lainnya. Kalau kita tidak menyadari dan mewaspadai perkembangan ini, dapat mempercepat perapuhan nilai-nilai kebangsaan kita.

Kita bersyukur memiliki Pancasila sebagai “nilai bersama (*shared values*)” yang bisa dipedomani sebagai rujukan bersama untuk mendorong proses transformasi struktur dan kultur, demi terwujudnya “*common domain*” identitas ke-Indonesia-an, tanpa menanggalkan identitas etnisitas dan identitas lainnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai “nilai bersama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian ditetapkan sebagai “Norma Fundamental Negara (*Staats Fundamental Norm*)”. Dalam kedudukannya sebagai *staats fundamental norm*, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau cita hukum (*recht idee*) yang tertinggi, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila seharusnya menjadi norma dasar dan sumber dasar bagi pembentukan konstitusi Indonesia.

Namun setelah 97 tahun Sumpah Pemuda diikrarkan dan 80 tahun Pancasila ditasbihkan sebagai dasar filosofis dan ideologi negara,

semangat kebangsaan kita seakan mulai memudar. Pancasila belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dan menjelma ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas dengan realitas aktualisasinya. Bahkan, kita seakan menjauh darinya.

Pancasila belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan menjadi “ideologi kerja (*working ideology*)” dalam praksis pembangunan yang memandu kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila belum dijadikan sebagai kerangka paradigmatis dalam pembangunan nasional. Pancasila sebagai norma dasar juga belum sepenuhnya mewujudkan ke dalam konstitusi kita, terutama setelah empat kali amandemen.

Sayangnya, Pancasila yang kita yakini mampu berfungsi sebagai pemersatu, pembentuk identitas bangsa, tumpuan yang kokoh bagi bangunan ke-Indonesia-an, pemberi arah dan tuntunan, mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial, serta penangkal segala macam bentuk ancaman, belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dan menjelma ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masih terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas dengan realitas aktualisasinya. Pancasila belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan menjadi “ideologi kerja (*working ideology*)”. Ideologi Pancasila belum dijadikan sebagai kerangka paradigmatis dalam pembangunan nasional. Inilah keprihatinan mendalam Aliansi Kebangsaan.

Bagi Aliansi Kebangsaan, membela Pancasila tidak cukup hanya dengan kerangka keyakinan (*mitos*) dan pengetahuan (*logos*), tetapi harus diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata (*etos*). Untuk itulah Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan FKPI, YSNB, serta bersama para mitra dialog: Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, HIPMI, Media Kompas, melalui berbagai diskusi, berusaha menjadikan Pancasila sebagai “kerangka operasional” (paradigma) pembangunan nasional dalam tiga ranah kehidupan sosial yaitu: Ranah Tata Nilai, Ranah Tata Kelola, dan Ranah Tata

Sejahtera. Hanya dengan menjadikannya sebagai paradigma pembangunan nasional, Aliansi Kebangsaan berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat menjaga Pancasila sebagai “Titik Temu, Titik Tumpu, dan Titik Tuju” dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagai titik temu, Pancasila telah mempersatukan seluruh perbedaan dan kemajemukan bangsa ini untuk hidup bersama dalam bangunan ke-Indonesia-an. Sedangkan sebagai “titik tumpu”, sudah seharusnya Pancasila menjiwai dan mewujudkan ke dalam konstitusi kita yang berisi logika, sistematis, dan struktur dasar kenegaraan kita. Dan sebagai “titik tuju”, Pancasila seharusnya teraktualisasikan ke dalam “Haluan Negara” yang menjadi penuntun arah pembangunan bangsa dan Negara kita.

Paradigma pembangunan tiga ranah Pancasila yang telah dilakukan, akan terus disosialisasikan dan diperdalam melalui FGD, dialog, podcast, seminar, kongres kebangsaan, dan kegiatan lainnya. Untuk ini, Aliansi Kebangsaan telah menyediakan berbagai *platform* dan ruang diskusi, antara lain: “Podcast Saatnya Cendekiawan Bicara”, “Forum Urus Rembuk Kebangsaan”, dan forum pertukaran pikiran lainnya.

Aliansi Kebangsaan terus mengajak para cendekiawan dan ilmuwan untuk terus bersama menjadikan Pancasila sebagai *mainstream* paradigma pembangunan nasional, dan terus mengembangkan epistemologi Pancasila sebagai jembatan aktualisasinya. Sebagai bangsa yang lahir dari gagasan kaum cendekiawan melalui Budi Utomo dan Sumpah Pemuda di masa lalu, Aliansi Kebangsaan yang merupakan jaringan intelektual lintas kultural dan lintas keyakinan, yang dipersatukan oleh kepedulian yang sama untuk menguatkan dan mengembangkan kebangsaan Indonesia. Para cendekiawan/intelektual perlu kembali terpanggil dalam memecahkan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi berdasarkan Pancasila.

Pengurus Aliansi Kebangsaan bersama beberapa tokoh filantropis lainnya yang peduli dengan

kebangsaan kita, juga meluncurkan inisiatif “Dana Darma Pancasila”, untuk mengajak semakin banyak cendekiawan dalam mengembangkan epistemologi Pancasila, dengan memberi bantuan dana penelitian dan kerja ilmiah dalam isu-isu yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila (tata nilai, tata kelola, tata sejahtera).

Bagi Aliansi Kebangsaan, Indonesia harus “Kembali ke Fitrah Cita Negara berdasarkan Pancasila”. Pancasila hendaknya tidak hanya menjadi hafalan atau terdengar dalam sambutan-sambutan resmi, tetapi benar-benar harus nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pancasila harus menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Pancasila harus menjadi ideologi kerja (*working ideology*).

Dengan melakukan upaya sungguh-sungguh untuk merawat dan memperjuangkan kebangsaan Indonesia, mudah-mudahan integrasi nasional sebagai salah satu penyangga utama bangunan Indonesia dapat tetap kita jaga, bahkan kita perkokoh. Dengan demikian, mudah-mudahan teori tentang negara lemah (*weak state*) dari Francis Fukuyama, apalagi teori negara gagal (*failed state*) dari Noam Chomsky, tidak akan pernah berlaku bagi Indonesia. Untuk itulah perlu adanya gerakan revitalisasi kebangsaan yang melibatkan semua pihak pemilik negeri ini. ***



15 Tahun **ALIANSI** **KEBANGSAAN**

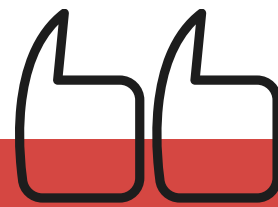
Puji syukur kepada Allah SWT karena atas perkenan-Nya, kita diberi kesehatan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Aliansi Kebangsaan ke-15 pada 28 Oktober 2025, masih dalam suasana peringatan momen historis Sumpah Pemuda. Aliansi Kebangsaan yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2010, didasari oleh kepedulian para pendirinya untuk ikut memajukan kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila, dan diperuntukkan sebagai wadah perjuangan bagi kaum cendekiawan untuk ikut membangun negeri dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi.

Hari Sumpah Pemuda dipilih sebagai momen pendirian Aliansi Kebangsaan karena menyadari bahwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928, merupakan tonggak sejarah penting dalam proses “kebangsaan (*nationhood*) menjadi Indonesia”. Dari peristiwa sejarah Sumpah Pemuda tersebut, ada “kesadaran dan pengakuan” atas perbedaan-perbedaan, kemudian “berkehendak” yang kuat untuk melebur dalam satu bangunan ke-Indonesia-an. Inilah “janji kebangsaan”, yang merupakan modal sosial penting, sekaligus “cerlang” bagi perjuangan kemerdekaan di masa lalu dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia ke depan.

Bangsa Indonesia juga telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai “nilai bersama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian ditetapkan sebagai “Norma Fundamental Negara (*Staats Fundamental Norm*)”, yang dituliskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai *staats fundamental norm*, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau cita hukum (*recht idee*) yang tertinggi, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.



Pontjo Sutowo - Ketua Aliansi Kebangsaan



Aliansi Kebangsaan percaya bahwa perubahan sejati lahir dari kesadaran dan kekuatan ide para cendekiawan dengan otoritas intelektualnya. Sejarah membuktikan bahwa dalam setiap fase penting perjalanan sejarah bangsa, kaum cendekiawan selalu memainkan peran strategis sebagai penunjuk arah, penjaga nurani publik, dan pembentuk kesadaran kolektif.

Oleh karena itu, Pancasila seharusnya menjadi norma dasar dan sumber dasar bagi pembentukan konstitusi Indonesia.

Namun setelah 97 tahun sumpah Pemuda diikrarkan dan 80 tahun Pancasila ditasbihkan sebagai dasar filosofis dan ideologi negara, semangat kebangsaan kita seakan mulai memudar. Dan, Pancasila yang telah terbukti merupakan ideologi tahan uji, belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dan menjelma ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas dengan realitas aktualisasinya. Bahkan, kita seakan menjauh darinya.

Pancasila belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan menjadi “ideologi kerja (working ideology)” dalam praksis pembangunan yang memandu kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu belum dijadikan sebagai kerangka paradigmatis dalam pembangunan nasional. Pancasila sebagai norma dasar juga belum sepenuhnya mewujudkan ke dalam konstitusi kita, terutama setelah empat kali amandemen.

Untuk itulah Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPP, HIPMI, Media Kompas, PPAD, dan beberapa mitra strategis lainnya, melalui diskusi yang cukup panjang, berusaha menjadikan Pancasila dari kerangka normatif dan konseptual menjadi “kerangka operasional” (paradigma) pembangunan nasional dalam tiga ranah kehidupan sosial, yaitu Ranah Tata Nilai, Ranah Tata Kelola, dan Ranah Tata Sejahtera. Hanya dengan menjadikannya sebagai paradigma pembangunan nasional, Aliansi Kebangsaan berkeyakinan, bangsa Indonesia dapat menjaga Pancasila sebagai “Titik Temu, Titik Tumpu, dan Titik Tuju” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai titik temu, Pancasila telah mempersatukan seluruh perbedaan dan kemajemukan bangsa ini untuk hidup bersama dalam bangunan ke-Indonesia-an. Sedangkan sebagai “titik tumpu”, sudah seharusnya Pancasila menjiwai dan mewujudkan

ke dalam konstitusi kita yang berisi logika, sistematika, dan struktur dasar kenegaraan kita. Dan sebagai “titik tuju”, Pancasila seharusnya teraktualisasikan ke dalam “Haluan Negara” yang menjadi penuntun arah pembangunan bangsa dan Negara kita.

Berangkat dari kehendak untuk menjadikan Pancasila sebagai mainstream paradigma pembangunan nasional dan terus mengembangkan epistemologi Pancasila sebagai jembatan aktualisasinya, Aliansi Kebangsaan bersama beberapa tokoh filantropis lainnya yang peduli dengan kebangsaan kita, juga meluncurkan inisiatif “Dana Darma Pancasila”. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mengajak semakin banyak cendekiawan dalam mengembangkan epistemologi Pancasila, dengan memberi bantuan dana penelitian dan kerja ilmiah dalam isu-isu yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila.

Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan

Setelah 27 tahun reformasi dan diberlakukannya UUD 1945 hasil empat kali amandemen, bangsa Indonesia telah meraih berbagai kemajuan *incremental* dan perubahan mendasar, dengan berbagai implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari, selain membawa implikasi positif, amandemen UUD 1945 juga telah menimbulkan berbagai implikasi negatif pada tiga ranah kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

Pada ranah tata nilai, etik mengalami kemunduran. Dengan melulunya dimensi etik, Indonesia sebagai bangsa majemuk kehilangan basis dan simpul rasa saling percaya. Tanpa basis integritas, cita persatuan menjelma jadi perseteruan. Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dirayakan dengan surplus ritual dan ucapan, namun miskin penghayatan dan pengamalan. Dalam realitasnya, Pancasila tidak lagi dijunjung tinggi sebagai “titik temu, titik tumpu, dan titik tuju” kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada ranah tata kelola politik kenegaraan, kebebasan yang dimungkinkan oleh demokrasi harus dibayar mahal dengan robohnya rumah tradisi kekeluargaan. Desain demokrasi dan kelembagaan negara menyimpang dari prinsip negara hukum, negara persatuan dan negara

keadilan, seperti dikehendaki oleh cita negara Pancasila. Berdasarkan ontologis pendirian negara, Indonesia yang dikehendaki adalah negara kekeluargaan yang bersifat inklusif, yang memberi ruang bagi “partisipasi” segala keragaman kekuatan rakyat. Dalam mengusung konsep negara kekeluargaan seperti itu, dan sebagai implementasi semangat Pancasila, maka prinsip demokrasi kita seharusnya adalah demokrasi permusyawaratan.

Prinsip demokrasi permusyawaratan tentu harus tercermin dalam kerangka representasi dan modus pengambilan keputusan yang bersifat inklusif, dengan menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, baik dalam kerangka representasi maupun pengambilan keputusan, kekuatan Negara (*state*) menjadi dominan dalam relasi bernegara, dan berpotensi menjadi tirani. Acemoglu dan Robinson dalam bukunya “The Narrow Corridor: States, Societies, and The Fate of Liberty (2019)” mengingatkan akan pentingnya keseimbangan antara kekuatan Negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Untuk itulah pemberdayaan masyarakat menjadi penting.

Pada ranah tata sejahtera, tata kelola, ekonomi belum mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Kesenjangan sosial masih lebar karena pengabaian prinsip keadilan dalam distribusi kesejahteraan angkut harta, kesempatan dan privilese sosial. Kita masih terjebak dalam paradigma ekonomi lama, dengan ekonomi ekstraktif yang berbasis sumber daya alam (*resource based economy*). Terperangkap dalam paradigma itu membuat kita kehilangan wahana peningkatan kapabilitas belajar untuk mengolah dan mengembangkan nilai tambah potensi sumber daya alam kita.

Kita memang kaya akan sumber daya alam, tetapi bukan menjadi negara “kaya” (*rich, wealthy*) cita-cita kemerdekaan kita, melainkan menjadi negara yang “makmur” (*prosper*). Sejumlah negara bisa menjadi kaya hanya karena memiliki satu atau dua sumber daya alam yang berlimpah, namun kekayaan seperti itu tidak bisa berkelanjutan. Untuk menjadi makmur, banyak negara sudah mentransformasikan ekonominya berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*), untuk

menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan, yang bisa meluaskan mobilitas vertikal secara lebih inklusif.

Kita juga belum berhasil mengupayakan perekonomian yang mandiri dengan jiwa merdeka, inklusif, yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi, berkeadilan serta berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), sebagaimana dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Seharusnya dipastikan bahwa yang berkembang di negeri ini bukan sekadar pembangunan di Indonesia, tetapi pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan dari, oleh, untuk seluruh rakyat Indonesia dan kemudian untuk dunia. Untuk itulah pentingnya mengembangkan model pembangunan partisipatif (*participatory development*) yang bertumpu pada komunitas (*community driven development*).

Dengan memperhatikan berbagai distorsi dan destruksi dalam tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera dalam rentang waktu 27 tahun reformasi, bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi dan tata kelola negara yang berkembang tidak berada di jalur yang tepat. Distorsi dan degenerasi demokrasi bukan hanya mencerminkan kegagalan perseorangan, akan tetapi kegagalan sistemik yang sudah jauh dari “cita (konsepsi) Negara Indonesia” berdasarkan Pancasila yang hendak dibangun oleh para pendiri bangsa, yaitu: Negara Hukum, Negara Persatuan, dan Negara Keadilan.

Oleh karena itulah, Aliansi Kebangsaan menawarkan untuk kembali kepada fitrah cita Negara berdasarkan Pancasila, kita dapat memulai dengan proses penemuan kembali diri kesejarahannya (*historical self-invention*). Bangsa ini dapat bercermin pada dirinya sendiri: mengenali akar budaya, alam, dan kesejarahannya, memahami kontribusi pentingnya dalam pergaulan dunia, serta menegaskan kembali martabatnya di pentas global.

Mengenali potensi, kekuatan, kemampuan, dan mempelajari kejayaan bangsa masa lalu bukan hanya tentang nostalgia, tetapi juga tentang membangun visi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah dan gemilang. Kisah-kisah kejayaan

masa lalu dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan “imajinasi” masa depan bagi keberlanjutan bangsa dalam upaya mencapai tujuan dan cita-citanya.

Tentu menjadi tantangan bangsa ini, bagaimana mengkontekstualisasikan kembali cerlang warisan peradaban bangsa ini menjadi pandu masa depan. Oleh karena itulah, maka peringatan ulang tahun ke-15 Aliansi Kebangsaan ini mengangkat tema: “Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan”. Latar belakang sosio-kultural dan warisan peradaban yang kaya memberikan kedalaman strategis yang dapat diproyeksikan dalam setiap perjuangan bangsa Indonesia ke depan.

Aliansi Kebangsaan percaya bahwa perubahan sejati lahir dari kesadaran dan kekuatan ide para cendekiawan dengan otoritas intelektualnya. Sejarah membuktikan bahwa dalam setiap fase penting perjalanan sejarah bangsa, kaum cendekiawan selalu memainkan peran strategis sebagai penunjuk arah, penjaga nurani publik, dan pembentuk kesadaran kolektif. (Sambutan Ketua Aliansi Kebangsaan pada acara HUT ke-15 Tahun Aliansi Kebangsaan) ***



OPINI

Mengurangi *Food Loss* dan *Food Waste* untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh **I Dewa Putu Rai**

(Pakar Aliansi Kebangsaan)

Kehilangan makanan (*Food Loss*) dan pemborosan makanan (*Food Waste*) atau keduanya sering disebut dengan “sampah makanan/pangan” merupakan isu global yang saat ini menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Mulai dari negara berkembang hingga negara maju telah mencoba mengembangkan berbagai pendekatan dan metode untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada tahun 2023, lebih dari 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun secara global yang setara dengan sepertiga produksi pangan dunia. Di sisi lain, 795 juta manusia di dunia masih menderita kelaparan.

Di Indonesia sendiri, tanpa disadari sampah makanan telah menjadi isu yang sangat serius. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih sebagai penghasil sampah makanan tertinggi kedua di dunia yaitu 300 kilogram sampah makanan per orang setiap tahun (Economist Intelligence Unit, 2020). Sedangkan *United Nations Environment Programme* (UNEP) melalui laporan *Food Waste Index Report* tahun 2024 memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan rumah tangga terbanyak se-Asia Tenggara, tepatnya 14,73 juta ton per tahun.

Dan menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan total sekitar 19,14 hingga 19,45 juta ton timbunan sampah yang mayoritasnya adalah sampah makanan. Dari total timbunan sampah nasional ini, 41,55% disumbang oleh timbunan sampah makanan. Tentu angka yang cukup signifikan.

Sampah makanan, selain menyebabkan hilangnya nilai ekonomi pangan itu sendiri, juga berdampak langsung terhadap memburuknya ketahanan pangan nasional, terhadap lingkungan dan sosial. Mengingat dampak sampah makanan demikian luas tentu kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk pengelolaannya.



Mengingat dampak sampah makanan yang demikian luas, pengelolaannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan. Bersyukur, sudah banyak pihak yang menaruh perhatian untuk ikut mengkampanyekan pengurangan sampah makanan ini termasuk Aliansi Kebangsaan.

Aliansi Kebangsaan sebagai wadah perjuangan kaum cendekiawan/intelektual sudah lama ikut mengkampanyekan pengurangan sampah makanan ini. Berbagai kegiatan sudah dilakukan dalam rangka ikut mengkampanyekan pengurangan sampah makanan ini, antara lain melalui FGD, Podcast, diskusi publik, dan akun media sosialnya. Kali ini melalui tulisan dalam majalah digital Aliansi Kebangsaan.

Dengan mengkampanyekan sampah makanan, diharapkan Aliansi Kebangsaan dapat ikut meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang seriusnya masalah ini, menginspirasi perubahan perilaku individu dan keluarga dalam mengonsumsi makanan, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola sampah makanan serta mendorong pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular.

Ketahanan Pangan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia, demikian juga Indonesia, maka

kebutuhan akan pangan pun terus meningkat. Sebagai kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia yang paling utama, pangan merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sejarah membuktikan bahwa isu pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional suatu negara.

Seperti yang pernah terjadi di Mesir, Kamerun, Haiti, dan Burkina Faso, akibat kelangkaan pangan telah memicu terjadinya kerusuhan yang meluas. Karenanya, ketersediaan pangan menjadi isu strategis global yang bisa menjadi sumber konflik bahkan perang antar negara. Dari berbagai catatan bahwa sekitar 70% konflik yang terjadi di dunia bersumber dari isu energi dan pangan.

Oleh karena itulah maka ketahanan pangan sudah seharusnya menjadi salah satu kepentingan nasional utama Indonesia yang perlu terus diperjuangkan. Terlebih karena program “*Sustainable Development Goals* (SDGs)” yang merupakan komitmen global sekaligus juga komitmen Indonesia, telah menetapkan salah satu tujuannya yang harus dicapai pada tahun 2030 yaitu: “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan”. Karenanya dapat dimengerti bahwa ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa sudah menjadi prioritas nasional Presiden Prabowo yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029 dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

Secara umum, “Ketahanan Pangan” dapat dipahami sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, baik menyangkut ketersediaan (*availability*), keterjangkauan atau akses (*affordability*) penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi, serta kualitas/keamanannya. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan, dilakukan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Dengan demikian maka ketahanan pangan harus diupayakan dengan tetap memperhatikan

“kemandirian dan kedaulatan” pangan. Hal inilah yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah saat ini.

Berdasarkan penilaian *Global Food Security Index* (Indeks Ketahanan Pangan Global) dari *The Economist Intelligence Unit* yang dipublikasikan pada Desember 2022, Indonesia dengan skor 60,2 berada di posisi 63 dari 113 negara. Jika dicermati lebih dalam pada tiap indikator, Indonesia mendapat skor 50,9 untuk indikator ketersediaan, skor 81,4 untuk indikator keterjangkauan, dan skor 56,2 untuk kualitas dan keamanan. Ketahanan pangan Indonesia tahun ini masih di bawah rata-rata global dengan indeks 62,2 serta lebih rendah dibanding rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4. Ketersediaan pasokan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9.

Indonesia juga masih tertinggal dalam “Indeks Keberlanjutan Pangan (*Food Sustainability Index*)” yang menggambarkan pencapaian negara dalam keberlanjutan pangan dan sistem nutrisi yang dilihat dari aspek pertanian, limbah pangan, dan gizi. Dalam lap Oran yang diterbitkan EIU pada tahun 2020, *Food Sustainability Index* Indonesia dengan skor 59,1 menduduki peringkat ke-60 dari 67 negara. Rendahnya peringkat *Food Sustainability Index* Indonesia antara lain disebabkan oleh buruknya sampah pangan/makanan.

Keadaan ini tentu masih memprihatinkan mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber pangan yang beragam, serta keadaan geografi dan iklim yang mendukung. Rendahnya peringkat Indonesia pada *Food Security Index* dan *Food Sustainability Index* tersebut menandakan bahwa masih banyak hasil produksi makanan yang tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga terbuang dan mubazir.

Banyak negara, untuk memenuhi ketersediaan pangannya dilaksanakan melalui swasembada dengan cara memproduksi di dalam negeri. Konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif dalam mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya dan tidak tergantung pada pasar

internasional. Hal ini juga sedang diupayakan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

Namun berbagai fenomena global seperti perubahan iklim (*climate change*), pandemi covid-19 yang berkepanjangan beberapa tahun yang lalu, berbagai konflik termasuk perang Rusia-Ukraina telah mengancam produksi dan ketersediaan pangan banyak Negara termasuk Indonesia karena terjadi penurunan produksi, kenaikan harga pangan, kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi pangan dan restriksi ekspor negara lain. Menghadapi fenomena ini, ada kebutuhan untuk membangun sistem produksi berkelanjutan (*sustainable*) tanpa terpengaruh oleh perubahan iklim. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan khusus berupa perlindungan terhadap para petani yang mengalami gagal panen serta mendorong pengembangan inovasi teknologi pertanian dan pangan.

Dalam memenuhi ketersediaan pangan, kita juga masih mengalami masalah kehilangan pangan (*food loss*) dan pemborosan pangan (*food waste*). Oleh karena itu, jawaban atas kebutuhan ketersediaan pangan yang akhirnya berpengaruh terhadap ketahanan pangan, tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi, namun juga mengatasi masalah kehilangan dan pemborosan pangan secara sungguh-sungguh.

Food Loss dan Food Waste

Food Loss dan *Food Waste* merupakan isu global yang sudah cukup lama terjadi, namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa dampak yang ditimbulkannya begitu luas mengenai banyak sektor seperti lingkungan, ekonomi, sosial dan bahkan keamanan nasional. Nilai keekonomian dari kehilangan dan pemborosan pangan juga cukup signifikan.



Kehilangan pangan (*food loss*) pada dasarnya terjadi dalam rantai produksi, meliputi tahap panen, pasca-panen, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Pada umumnya kehilangan pangan tersebut terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana produksi dan masih rendahnya pemanfaatan teknologi seperti teknologi transportasi, rantai dingin (*cold chain*), dan lain-lainnya yang bisa menyebabkan pangan menjadi mudah rusak ataupun susut.



Sedangkan pemborosan pangan (*food waste*) merupakan pangan yang terbuang sebagai limbah pangan, yang biasanya terjadi di tingkat pengecer (*retail*) dan konsumsi. *Food waste* terjadi ketika makanan sudah mencapai tahap akhir dalam rantai pasokan tapi tidak digunakan dan dibuang. Pemborosan pangan yang terjadi pada tingkat pengecer selain disebabkan oleh perilaku pengecer itu sendiri, seperti menyimpan pangan terlalu banyak dan lama, juga karena terbatasnya fasilitas penyimpanan yang dimiliki pengecer sehingga menyebabkan pangan menjadi cepat rusak. Tempat kegiatan yang berpotensi terjadi pemborosan pangan sudah dimulai pada saat bahan pangan diperjual-belikan di tingkat pasar pengecer hingga tiba di rumah konsumen.

Pada tingkat konsumsi rumah tangga pemborosan pangan terjadi karena pangan tidak dimanfaatkan secara baik,

seperti membeli makanan terlalu banyak sehingga menjadi kadaluwarsa, cara pengawetan makanan yang salah dan penyajian yang berlebihan di rumah atau di restoran. Contoh lainnya adalah mengambil makanan secara berlebih sehingga masih tersisa banyak di piring. Menurut PBB, sebagian besar limbah makanan atau 61 persen ditemukan di rumah tangga.

Meskipun terjadi pada tahap yang berbeda, keduanya yaitu kehilangan pangan dan pemborosan pangan memiliki dampak serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, dengan menyebabkan pemborosan sumber daya alam dan berkontribusi pada masalah seperti kelaparan, ketidakstabilan harga pangan, dan dampak lingkungan yang merugikan.

Menurut data dari *The Economist Intelligence Unit* tahun (2020), Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara yang membuang makanan terbanyak di dunia setelah Arab Saudi. Rata-rata setiap orang Indonesia membuang sekitar 300 kilogram makanan layak makan setiap tahunnya, atau secara keseluruhan, hampir 13 juta ton makanan dibuang sia-sia setiap tahunnya di Indonesia.



Jumlah limbah makanan tersebut dinilai mampu menghidupi 11% penduduk atau 28 juta penduduk miskin yang kurang mendapat asupan gizi. Tentu bisa menjadi salah satu solusi masalah *stunting* dan *wasting* di Indonesia yang besarnya mencapai 30% dari jumlah penduduk. Masyarakat kelas atas dan menengah adalah penyumbang sisa makanan terbesar di Indonesia dan bila dikelompokkan berdasar sumbernya berasal dari restoran, hotel, usaha katering, perusahaan dan rumah tangga.

Kehilangan dan pemborosan pangan, selain menyebabkan hilangnya nilai ekonomi pangan itu sendiri, juga berdampak langsung terhadap memburuknya ketahanan pangan nasional kita. Aspek ini masih belum mendapat perhatian dalam kegiatan riset ekonomi pangan, ataupun dalam pembahasan tentang kebijakan pangan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu sangat menarik untuk dilihat sampai seberapa jauh kontribusi pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan terhadap peningkatan ketersediaan pangan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan.

Sampai saat ini belum banyak dibahas secara serius tentang nilai keekonomian atas kehilangan dan pemborosan pangan Indonesia. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2011, kerugian dari timbulan sampah makanan di Indonesia pada tahun 2000 – 2019 diestimasikan sebesar 213-551 triliun rupiah/tahun atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia. Nilai kehilangan ekonomi paling besar terjadi di sektor tanaman pangan, tepatnya di kategori padi-padian sebesar 88-155 triliun Rupiah per Tahun. Dan jumlah orang yang dapat diberi makan dari kehilangan kandungan gizi (energi) dari sampah makanan pada tahun 2000-2019 bisa mencapai 61-125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia.

Terdapat kemungkinan bahwa potensi kehilangan ekonomi tersebut bernilai lebih besar, dikarenakan data yang digunakan dalam perhitungan kehilangan ekonomi menggunakan data harga pangan yang tersedia yaitu 64-88 komoditas dari total 146 komoditas yang terdapat di NBM. Tahapan rantai pasok yang menyebabkan terjadinya kehilangan ekonomi terbesar terdapat pada tahapan *food waste* yaitu sebesar 107–346 triliun rupiah/tahun.

Sampah makanan juga berdampak terhadap lingkungan dan sosial. Dari beberapa sumber yang penulis catat, dampak sampah makanan, antara lain:

1. Dari beberapa penelitian diketahui bahwa kehilangan dan pemborosan pangan menghasilkan 1,73 giga ton CO₂ secara akumulasi atau rata-rata 7% dari total emisi GRK Indonesia per tahun.
2. Makanan yang terbuang dan membusuk di

tempat pembuangan akhir (TPA) menghasilkan gas metana dan karbon dioksida, yang merupakan gas rumah kaca dan berkontribusi pada pemanasan global.

3. Pembuangan makanan berarti menyia-nyiakan semua sumber daya yang digunakan untuk memproduksinya, seperti air, energi, dan tenaga kerja.

4. Sampah makanan menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di TPA, yang dapat membebani sistem pengelolaan limbah.

5. Di Indonesia, masih banyak orang yang kekurangan gizi, sementara di sisi lain pangan yang terbuang jumlahnya sangat besar

6. Pemborosan makanan dapat berkontribusi pada kenaikan harga pangan.

Demikian luasnya dampak dari sampah makanan, karenanya harus ada upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk menekan kehilangan dan pemborosan pangan ini. Bersyukur bahwa penanganan kehilangan dan pemborosan pangan telah menjadi perhatian sungguh-sungguh pemerintah. Badan Pangan Nasional lewat kampanye “Stop Boros Pangan” serta “Belanja Bijak” telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi untuk mengurangi pemborosan pangan. Sesuai komitmen dalam SDGs, negara-negara di dunia termasuk Indonesia diharapkan dapat mengurangi 50% *food waste* per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030.

Dan Bappenas juga sudah melakukan kajian yang sangat mendalam tentang *Food Loss* dan *Food Waste* (FLW) periode 2000-2019 dalam rangka mendukung penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. Laporan kajian yang dikeluarkan pada tahun 2021 yang lalu meliputi estimasi jumlah timbulan FLW 2000-2019 di Indonesia, penyebab dan pendorong utama timbulan FLW, proyeksi timbulan FLW pada tahun 2020 – 2045, serta rekomendasi strategi dan kebijakan pengelolaan FLW pada tahun 2020 – 2045.

Upaya peningkatan ketahanan pangan nasional yang penuh tantangan, tanpa dibarengi dengan upaya pengurangan sampah makanan (*food loss* dan *food waste*) yang cenderung meningkat tentu masih menjadi masalah. Upaya ini tentu tidak bisa

sepenuhnya kita serahkan kepada pemerintah. Harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari hulu ke hilir yang melibatkan akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah dan media massa.

Peran masyarakat juga sangat diperlukan. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat terutama pada tingkat keluarga untuk membantu mengurangi sampah makanan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kini, sebagian restoran telah menetapkan aturan denda bagi pelanggan yang menyisakan makanannya. Selain itu, bermunculan organisasi masyarakat yang menampung sisa makan masih layak dimakan untuk dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Banyak komunitas yang mulai melakukan kampanye anti sampah makanan. Mereka mengkampanyekan untuk makan seperlunya, tidak berlebihan, sehingga tidak menyisakan makanan.



Mudah-mudahan tulisan ini dapat menggugah kesadaran kolektif masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam mengurangi sampah makanan yang sudah menjadi masalah cukup serius dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan. Masyarakat terutama keluarga dapat ambil peran dalam mengurangi *food loss* dan *food waste* atau sampah makanan dengan mengubah perilaku keluarga dalam konsumsi pangan, antara lain dengan: membuat rencana makan yang tepat, membeli makan yang kita butuhkan saja, mendaur ulang apa yang tersisa, simpan dengan baik apa yang tidak kita makan, dan mengambil makanan sesuai porsi yang dibutuhkan.



Sebenarnya banyak kearifan lokal dari nenek moyang kita yang mencerminkan upaya untuk mencegah terjadinya pemborosan atau limbah makanan. Seperti kata bijak atau nasehat: “Kalau makanannya tidak dihabiskan, nanti makanan atau nasinya nangis, lho!” Atau “Kalau makanannya tidak habis nanti ayamnya mati lho”, dan lain-lain. ***

Masyarakat terutama keluarga dapat ambil peran dalam mengurangi *food loss* dan *food waste* atau sampah makanan dengan mengubah perilaku keluarga dalam konsumsi pangan, antara lain dengan: membuat rencana makan yang tepat, membeli makan yang kita butuhkan saja, mendaur ulang apa yang tersisa, simpan dengan baik apa yang tidak kita makan, dan mengambil makanan sesuai porsi yang dibutuhkan



“Post-Parliamentary Politics”: Model Alternatif Representasi Politik

Oleh **Manuel Kaisiepo**

(Pakar Aliansi Kebangsaan)

Sejak reformasi tahun 1998 yang mengawali proses transisi dari kehidupan politik otoriter-represif menuju ke proses demokratisasi, semua kita menaruh harapan besar pada partai politik sebagai instrumen utama dalam kehidupan politik modern berbasis demokrasi elektoral.

Harapan besar itu wajar dan seharusnya begitu, karena memang partai politik dan parlemen adalah wujud representasi politik rakyat dalam sistem demokrasi. Selain itu tugas pokok partai politik adalah melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat sebagai prasyarat kehidupan politik yang demokratis.

Ironisnya, sejak reformasi 1998 hingga kini, partai politik justru adalah salah satu institusi demokrasi yang paling sedikit tersentuh agenda reformasi, baik dilihat dari aspek *intra party democracy* (IPD); maupun secara eksternal yaitu perannya sebagai pilar dan motor penggerak demokratisasi.

Padahal pasca amandemen UUD 1945, kedudukan dan peran partai politik semakin menguat di parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol, budget, dan fungsi legislasi. Tetapi bukan hanya dalam lingkup parlemen, peran partai politik juga menguat dalam berbagai aspek mekanisme pemerintahan dan kenegaraan pada berbagai level tertentu.

Peran partai politik sangat menentukan dalam proses seleksi dan penetapan keanggotaan berbagai organ negara yang utama (*main state organs*) maupun organ pendukung (*state auxiliary organs*); partai politik juga berperan dalam seleksi dan penetapan kepala daerah; bahkan juga menentukan dalam proses seleksi dan pencalonan presiden sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga melahirkan ungkapan “presiden adalah petugas partai”.

Tetapi pada sisi lain, menguatnya kedudukan dan peran partai politik ternyata tidak diikuti oleh menguatnya demokrasi partisipatoris yang mampu meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik. Pola relasi partai dengan massa pemilihnya justru semakin berjarak dan hanya tampak selama masa kampanye pemilihan umum.

Pola relasi ini menyebabkan peran partai politik semakin surut sebagai saluran artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, sebaliknya lebih menampakkan dirinya sebagai *ekstension* dari elite pemimpinnya dan *ekstension* dari kekuatan-kekuatan oligarki.

Beberapa kajian terbaru menunjukkan, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, kedudukan dan peran partai politik dan parlemen justru menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan, untuk mempertahankan dominasi kekuasaan ekonomi-politik.

Di dalam tubuhnya sendiri, masalah *intra party democracy* masih menjadi persoalan besar yang dihadapi hampir semua partai politik. Partai masih sangat tergantung kepada Ketuanya dalam pola relasi patronase-klientelistik, dengan corak pengambilan keputusan yang didominasi oleh Sang Ketua. Hal ini berdampak pada model representasi politik yang memperlihatkan rendahnya relasi anggota partai di parlemen dengan rakyat sebagai basis konstituennya.

Hal lain adalah faktor pendanaan partai (*party financing*) yang terbatas (kecuali pada partai-partai tertentu). Keterbatasan dana menyebabkan partai politik rawan “diintervensi” kekuatan modal ekonomi-politik dari luar dirinya, yang pada gilirannya mengukuhkan pengaruh oligarki dalam tubuh partai sekaligus dalam kehidupan politik secara luas.

Studi Slater (2004) menemukan partai politik di Indonesia gagal menciptakan mekanisme *check and balance* yang jadi inti demokrasi, dan ini merupakan *accountability trap* dalam demokrasi di Indonesia, yang mendorong tumbuhnya perilaku kartel. Fenomena kartelisasi partai politik juga diperkuat studi Dodi Ambardi (2009).

Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan politisi partai anggota DPR dan pejabat pemerintah pada berbagai kementerian yang terus berlangsung hingga sekarang dengan angka ratusan milyar hingga triliunan, adalah contoh nyata dari dari fenomena kartelisasi politik dan politik oligarki.

Sejak reformasi tahun 1999, telah tercipta suatu sistem politik dan sistem kepartaian yang khas di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensial bergandengan dengan sistem multipartai. Pada awalnya kehadiran sistem multipartai ini mengindikasikan harapan bagi perkembangan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Tetapi setelah dua dekade lebih (1999-sekarang), eksistensi dan peran partai politik ternyata tidak sebagaimana diharapkan semula. Sistem multipartai yang bergandengan dengan system presidensialisme justru menghasilkan suatu model kompromi politik yang tidak berimbang, dengan

kekuatan mayoritas di parlemen justru kehilangan daya kritisnya dan sebaliknya menjadi pendukung pemerintah. Dengan demikian prinsip *check and balances* kurang berfungsi.

Gambaran ringkas tentang kecenderungan perubahan peran dan perilaku partai politik seperti diuraikan di atas memperkuat penilaian bahwa sistem politik Indonesia semakin elitis/monolitik/dan oligarkis, dan sebaliknya makin minim partisipasi politik rakyat.

Berbagai kelemahan partai politik sebagai representasi politik dan saluran artikulasi politik rakyat yang berdampak pada memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia, secara langsung atau tidak langsung ikut mendorong munculnya beberapa fenomena politik baru sebagai respons Masyarakat atas realitas di atas.

Salah satu fenomena itu adalah menguatnya peran demokrasi digital (*digital democracy*) dalam semua aspek kehidupan politik. Dalam Masyarakat mulai muncul kecenderungan kuat menggunakan kecanggihan teknologi digital sebagai medium baru artikulasi politik.

Banyak aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kini tidak lagi disalurkan melalui partai politik dan parlemen, melainkan melalui media sosial yang terbukti cukup efektif.

Menguatnya pengaruh demokrasi digital ini kemudian diikuti dengan kemunculan kelompok-kelompok di luar partai politik dan parlemen yang semakin kuat menjalankan fungsi dan peran sebagai *pressure groups* yang punya implikasi politik.

Apakah dua fenomena baru ini, demokrasi digital dan kemunculan kelompok-kelompok baru yang semakin kuat berperan sebagai *pressure groups* memperlihatkan gejala awal pergeseran peran lembaga-lembaga politik formal yang mulai beralih ke kekuatan-kekuatan sosial baru dalam masyarakat.

Dalam konteks ini menarik untuk membandingkan kajian Anthony Giddens tentang fenomena “*post-parliamentary politics*” di Eropa Barat beberapa

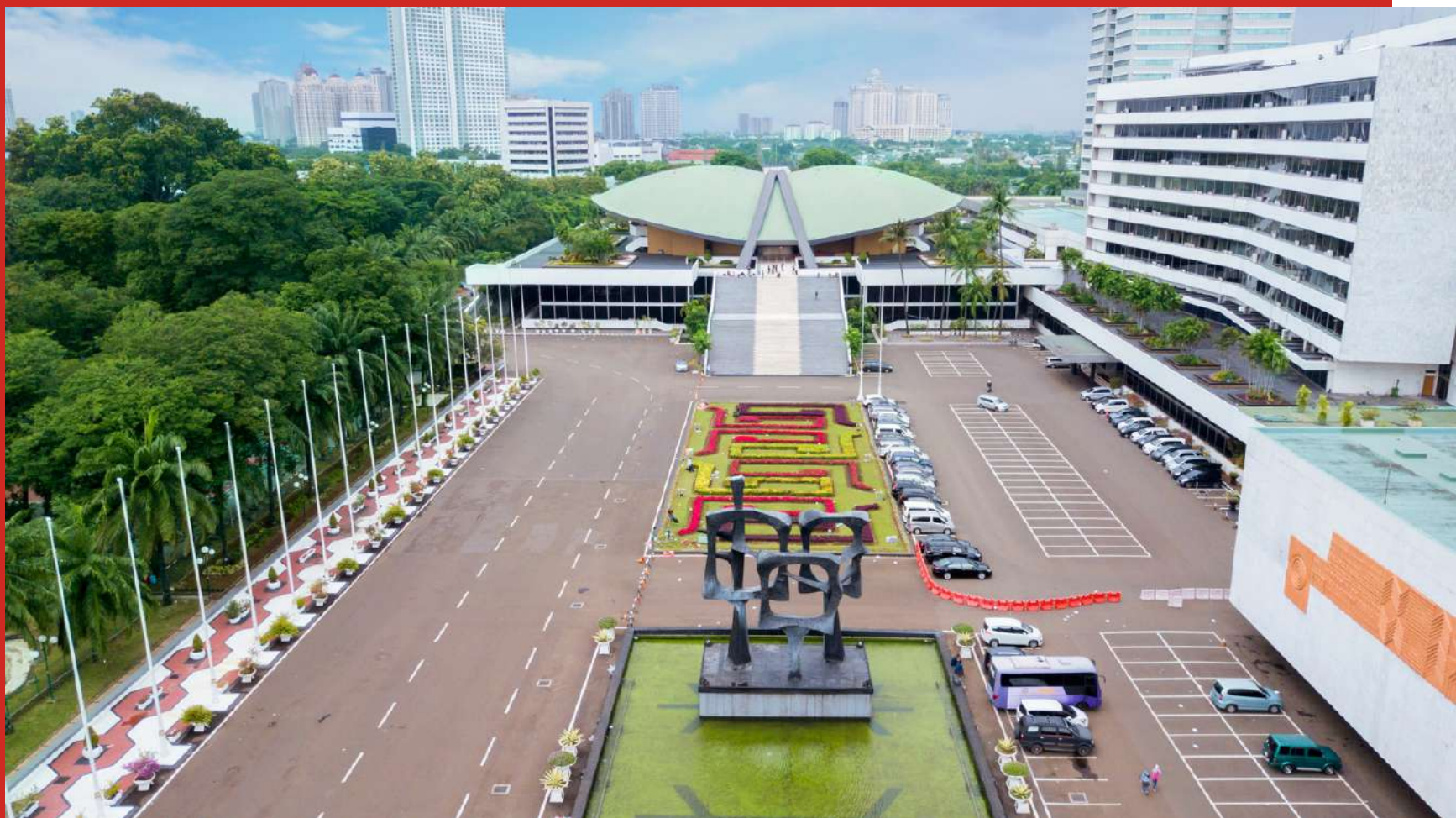
dekade lalu, yang menandai semakin bergesernya peran lembaga-lembaga politik formal seperti partai politik dan parlemen yang beralih kepada kelompok-kelompok sosial baru di masyarakat yang mampu berperan sebagai saluran artikulasi baru.

Ketidakpuasan atas peran dan kinerja partai politik di parlemen mendorong munculnya lembaga-lembaga baru sebagai penyalur aspirasi politik dan kepentingan rakyat, yaitu lembaga-lembaga yang oleh Giddens disebut "keagenan politik" atau "*political agency*".

Lembaga-lembaga "*political agency*" ini secara perlahan tapi pasti mulai muncul sebagai model alternatif representasi politik baru yang mampu menjalankan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang sebelumnya dijalankan oleh partai-partai politik.

Lembaga-lembaga "*political agency*" ini beroperasi di luar tatanan politik formal; dia adalah jaringan-jaringan sosial baru yang ditopang kekuatan jaringan digital dengan memproduksi dan menyebarkan ide-ide pada level akar rumput.

Apakah fenomena baru demokrasi digital dan kemunculan lembaga-lembaga semacam "*political agency*" sebagaimana dimaksud Anthony Giddens di Eropa Barat dapat menjadi semacam model alternatif representasi politik baru sekaligus sebagai saluran baru artikulasi dan agregasi kepentingan politik rakyat Indonesia di masa depan? ***



KEMANA

Sistem Pendidikan Nasional Kita akan Dibawa?

Oleh **Wisnubroto**

(Ketua Yayasan Suluh Nuswantara Bakti)

Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia dilakukan melalui satu proses pendidikan jangka panjang dan berlangsung terus seumur hidup. Kita ingat Titik Nol perjalanan pembangunan manusia Indonesia adalah di tahun 1908, saat Boedi Oetomo berdiri. Baru 20 tahun sesudahnya tumbuh kesadaran berbangsa bernegara Indonesia, saat Soempah Pemoeda tahun 1928. Dua dekade sesudahnya berdirilah negara bangsa NKRI - 17 Agustus 1945.



Apa yang terjadi dalam proses pembangunan bangsa selama ini tidak lain, satu proses pembelajaran yang terus menerus. Proses pembelajaran yang tidak boleh dibiarkan berlangsung alamiah secara coba-coba (*trial and error*) begitu saja, melainkan harus dilakukan melalui satu sistem pembelajaran holistik, sistemik dan sistematis. Itulah yang namanya pendidikan. Pendidikan mencakup pembelajaran *knowledge*, *skill* dan *attitude*. Dengan pendidikan kita mengasah dan mencerdaskan logika, keterampilan teknis dan etos kerja (karakter).

Pertanyaan pertama yang diajukan Kaisar Hirohito kepada Panglima Perangnya setelah kalah Perang Dunia kedua waktu itu:

“

“Berapa banyak guru yang masih kita miliki?”

Namun disamping kedua hal diatas, paradigma nasional Indonesia, menunjukkan pentingnya satu matra pendidikan lain yang perlu ditanamkan, yakni, “semangat kebangsaan Indonesia”. Tanpa matra kebangsaan, akan lahir manusia-manusia yang pandai, terampil dan memiliki etos kerja yang kuat, namun tidak dituntun oleh semangat kebangsaan yang tinggi, hingga dapat berkembang menjadi penghianat bangsa. Karenanya, pendidikan nasional harus mencakup trimatra pendidikan, yaitu Logika, Etika, dan Kebangsaan.

Patut dicatat bahwa dalam etika sudah terkandung pula ajaran agama, sesuatu yang khas Indonesia, berbeda dengan negara-negara lainnya. Agama juga memiliki keterkaitan dengan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia membuktikan bahwa Fatwa Jihad dari K.H. Hasyim Asy’ari telah membakar semangat perjuangan kemerdekaan pemuda-pemudi Indonesia dalam Pertempuran 10 November di Surabaya. Terbukti bahwa secara Ideologis, sila ke satu pancasila telah menjadi faktor pemersatu bangsa dan sekaligus turut membentuk karakter kebangsaan Indonesia yang bhinneka.

Last but not least, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan bangsanya. Keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Kebudayaan berkembang dan dibangun melalui pendidikan, pada saat yang sama pendidikan ditentukan oleh kebudayaan dan tingkat peradaban bangsa tadi. Diantara keduanya saling mempengaruhi dan saling menentukan, yang berlangsung terus menerus secara berkesinambungan, membentuk “siklus meningkat” (*swing up*) membentuk peradaban bangsa yang lebih tinggi.

Akhirnya, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa kondisi terberi dari kebangsaan Indonesia kita adalah multi-kultural terdiri dari beribu etnis, ras, suku bangsa dan agama yang berbeda, yang telah sama-sama bersepakat hidup bersama sebagai satu bangsa yang bhinneka namun tunggal ika. Oleh karenanya Pancasila senantiasa menjadi paradigma pembangunan peradaban bangsa yang paling tepat, karena Pancasila telah menjadi “Titik Temu” yang memiliki kekuatan pemersatu bangsa Indonesia, sekaligus menjadi “Titik Tumpu” bagi penyelenggaraan sistem tata-kelola negara bangsa, dan sebagai “Titik Tuju” didirikannya NKRI, yaitu menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (alinea empat Pembukaan UUD 1945).

UU No. 20 Tahun 2003

UU Sisdiknas 2003 membawa reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan :

- 1.UU ini mengintegrasikan pendidikan formal, non-formal dan informal ke dalam satu sistem pendidikan nasional yang setara.
- 2.Memberikan otonomi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- 3.Melahirkan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagai fondasi Kurikulum 2006, 2013, dan Kurikulum Merdeka.
- 4.Penguatan Pendidikan Keagamaan.
- 5.Penegasan Wajib Belajar dan Hak Warga Negara inklusif 9 tahun.
6. Penguatan Peran Masyarakat dan Swasta, seperti : Komite Sekolah ; Badan Penyelenggara Pendidikan dan pembiayaan bersama (*shared responsibility*) oleh masyarakat.
- 7.Kerangka Kualifikasi dan Jenjang pendidikan

nasional lebih jelas.

Implementasi UU No. 20 Tahun 2003

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, dalam implementasinya ternyata menunjukkan beberapa kelemahan pada tataran konseptual yang berpengaruh pada tata nilai dan gaya hidup dan perilaku kaum milenial dewasa ini.

Beberapa catatan dalam Naskah Akademik

Pada 6 Juli 2020 yang lalu, Aliansi Kebangsaan bersama mitra, yaitu YSNB dan FKPPi telah menyampaikan satu Naskah Akademik berisi usulan perbaikan UU No. 20 tahun 2003 kepada Komisi X DPR RI, yang intinya berisi hal-hal berikut :

- 1.Menghadirkan kembali kebudayaan sebagai ontologi pendidikan. Kebudayaan dan Pendidikan merupakan dua entitas yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Dalam penjabaran landasan filosofisnya tergambar dengan jelas keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan,
- 2.Meringkas kerangka dasar kurikulum menjadi Trimatra Pendidikan. Kerangka dasar kurikulum dalam UU Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional nantinya adalah Trimatra Pendidikan yang berisi: Kebangsaan, Etika dan Logika. Oleh karenanya, penyusunan mata pelajaran dalam kurikulum harus mengacu pada kerangka dasar Trimatra Pendidikan tadi, agar murid di sekolah tidak menghadapi terlalu banyak mata pelajaran dan buku pelajaran. kurikulum pendidikan disederhanakan,
- 3.Mensentralkan kembali pengurusan pendidikan. Karena Otonomi Daerah, pendidikan di Indonesia dikendalikan oleh 3 (tiga) tingkat pemerintahan, yakni, Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Pembagian kewenangan dan kewajiban antara ketiganya perlu diperjelas, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan kesenjangan karena tidak ada yang merasa bertanggungjawab. Pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah daerah diatas, telah berdampak tidak pastian bagi nasib guru. Pembinaan karier, penempatan dan kesejahteraan guru tidak berada dibawah satu pengelolaan yang memiliki standar meritokratis yang sama. Menghasilkan warga Negara unggul bersikap-mental Pancasila,
- 4.Menghasilkan warga Negara unggul berkarakter Pancasila. Definisi warga Negara Unggul merupakan gabungan antara kata warga Negara dan kata

unggul yang bermakna “patriot sejati yang takwa, ikhlas, berperi-kemanusiaan, adil, beradab, jujur, bertanggungjawab, mumpuni, ulet dan tangguh.” Ujungnya, melalui pendidikan mereka mendapat *knowledge (know what)*, *attitude (know why)* and *skills (know how)*. Warga Negara unggul memiliki kecerdasan dan nalar yang baik (Logika), memiliki karakter (sikap sosial) yang didasari moral agama dan nilai sosial-budaya yang baik (Etika) dan nasionalisme, Patriotisme dan semangat kebangsaan yang tidak diragukan lagi.

5. Menempatkan UU Sisbuddiknas sebagai UU Payung. UU Sisbuddiknas dalam ruang lingkupnya diharapkan dapat menyentuh semua hal dari pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan dimulai dari pendidikan PAUD, Dasar, Menengah, dan Tinggi. Sistem Pendidikan Nasional hendaknya dicakup dalam satu “UU tentang kebudayaan dan pendidikan nasional” yang mengatur hal-hal pokok, dan selanjutnya perinciannya diatur melalui peraturan-peraturan turunannya, seperti PP atau Permen sesuai dengan hirarki yang berlaku.
6. Pemberdayaan IPTEK melalui *Quad Helix*. *Quad Helix* menunjukkan keterhubungan timbal-balik (interelasi) diantara Perguruan Tinggi - Industri (Pengusaha) - Pemerintah, dan Masyarakat. Perguruan Tinggi berperan sebagai sumber daya ilmu pengetahuan & teknologi; Industri atau Pengusaha berperan sebagai produsen barang (memanfaatkan IPTEK) yang dibutuhkan masyarakat ; Masyarakat berperan sebagai konsumen (pasar) dan pemerintah berperan sebagai regulator dan dinamisator *quad helix*. *Quad Helix* diatas dapat dikembangkan lebih lanjut dengan adanya tiga faktor lainnya, yaitu peran Teknologi Informasi dan Media untuk mempercepat dinamika usaha (bisnis), sementara Otoritas Sertifikasi berperan untuk menjamin kualitas dan keamanan produk demi kepentingan masyarakat.
7. Pendidikan Inklusi yaitu pendidikan yang menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal (*regular*) di dalam kelas yang sama dengan ratio tertentu. Berkebutuhan khusus (*difabel-different ability*) di sini, artinya sangat luas, mencakup mulai dari anak-anak tunanetra, tunarungu, tunawicara,

tunagrahita, tuna-daksa, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, autisme, penyalahgunaan narkoba, penderita HIV-AIDS, maupun anak-anak yang memiliki kecerdasan tinggi (*gifted*) dan berbakat istimewa. Menurut Sapon dan Shevin, pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman sebayanya. Pendidikan ini bertujuan untuk emansipasi dan maksimalkan; kesempatan anak-anak berkebutuhan khusus untuk turut menikmati kebudayaan dan pendidikan.

Secara filosofis, pendidikan inklusif hampir sama dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meniadakan perbedaan dan menjadikan satu kesatuan dalam berbagai keberagaman.

Capaian Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo dalam Pendidikan Nasional

Mengingat perjalanan panjang dan kompleksitas permasalahan yang harus dilalui untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional secara holistik seperti di atas, tentu akan sulit untuk mengukur capaian pemerintah dalam pembangunan manusia Indonesia selama satu tahun terakhir ini.

Apa yang tampaknya dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo adalah program kerja yang bersifat “*Quick Win*”, seperti misalnya :

1. Dibentuknya Kementerian Kebudayaan tersendiri untuk membangun satu sistem kebudayaan nasional sebagai “*gestalt*” dari interaksi sistem nilai budaya etnis, ras dan suku bangsa yang menyebar diseluruh wilayah Nusantara, tanpa menghilangkan kebudayaan tradisional etnis, ras dan suku bangsa daerah masing-masing.
2. Dibentuknya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Nasional tersendiri untuk membangun kemampuan penguasaan IPTEK dan Inovasi Nasional yang berkoordinasi kuat dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Di bawah pimpinan baru, Prof. Dr. Arif Satria yang sebelumnya menjabat Rektor IPB University selama dua masa jabatan (2017–2028). Komunitas IPTEK di Indonesia berharap beliau dapat memajukan IPTEK dan Inovasi bersama Industri nasional.

3. Didirikannya SMA Garuda Unggulan yang ditujukan untuk memberikan pendidikan unggulan berstandar IB (*International Baccalaureate*) kepada anak-anak tamatan SMP yang "Gifted" (1% paling cerdas). Kepada mereka diberikan beasiswa penuh selama di SMA Berasrama (*boarding school*), dan setelah lulus akan diberi beasiswa LPDP mengikuti pendidikan S-1 di Universitas luar negeri. Pembinaan sekolah Garuda Unggulan ini dilakukan oleh Kementerian Dikristek.

4. Didirikannya 200 Sekolah Rakyat yang dirancang sebagai Sekolah Inklusif berasrama yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga rentan ekonomis dan bahkan ekstrim miskin (*extreme poverty*). Secara konseptual, program ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat tertinggal. Program ini juga merupakan satu rekayasa sosial untuk memberdayakan mereka dan sekaligus sebagai jaminan sosial bagi siswa dan keluarganya.

Kurikulum pendidikan mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional plus Pendidikan karakter dan keterampilan hidup (*life-skill*) secara kontekstual, sesuai dengan kondisi lingkungan sosial budaya setempat. Pembinaan program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI.

Program ini menghadapi beberapa tantangan seperti antara lain: penyiapan guru, pendanaan untuk menyelenggarakan fasilitas asrama dan berbagai sarana penunjang lainnya, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Merujuk kedua butir 3 dan 4 di atas, kritik mengatakan: banyak tantangan dihadapi dalam mengelola bermacam-macam sekolah, seperti sekolah SMA Unggulan, Sekolah Rakyat maupun sekolah pendidikan formal yang sudah ada, khususnya dalam sistem tata kelola dan pembinaan guru yang selama ini ditangani oleh berbagai lembaga pemerintah yang berbeda, terkait adanya UU Otonomi Daerah.

Dalam hubungan ini, komunitas guru mengusulkan dibentuknya satu Badan Pengelola Guru sebuah badan independen yang berwenang mengelola guru secara terpusat, agar segala carut-marut permasalahan guru dapat diatasi. Badan ini memberikan pelayanan kepada

sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang selama ini berada dibawah binaan beberapa Kementerian negara.

5. Program Makan Bergizi Gratis, cara cepat untuk mengatasi "stunting" yang banyak menimpa anak-anak usia dini di kota kecil dan desa-desa kita. Dewasa ini banyak kritik dan polemik yang ditujukan terkait dengan program ini, seperti tidak diikutsertakan-nya ibu-ibu di desa untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, atau keluhan tentang peralatan makan yang diimpor ketimbang menggunakan produk dalam negeri. Respons pimpinan program MBG ini pada umumnya bersifat positif dan bersedia untuk melakukan penyesuaian dengan keinginan masyarakat, asalkan tetap mempertahankan Standar Kualitas kecukupan Gizi dan prasyarat *hygiene* makanan. Ada usul, untuk melibatkan SMK Pariwisata, atau Akademi Perhotelan yang sudah meluluskan banyak "Chef" atau Juru Masak tersertifikasi. Juga ibu-ibu tukang masak yang memiliki "*tacit knowledge*" baik, tetapi tidak memiliki sertifikat. Mereka dapat juga disertakan selama tetap dibawah supervisi dan kontrol Chef yang bertanggung jawab.

6. Memperkuat kapasitas Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pendidikan agama, memperluas pandangan dan mengembangkan sikap inklusivitas pemuka-pemuka agama Indonesia ditengah upaya penetrasi ekstremisme dan radikalisme oleh gerakan trans nasional agama dari beberapa negara di Timur tengah. Prof. Nasarudin Umar – sekarang menteri Agama RI, sebelumnya beliau menjabat Rektor PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an) dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Selama ini beliau dikenal sangat kritis pada pengajaran Ilmu Fikih di pesantren-pesantren tradisional yang menggunakan dalil-dalil yang sudah berusia ratusan tahun sehingga banyak diantara alumninya yang mengembangkan sikap ekstrem, dan tidak kontekstual sesuai dengan perkembangan jaman. Beliau juga kerap memelopori sikap kerukunan antar pemuka agama (yang berbeda), sebagaimana ditunjukkan melalui program bersama yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta.

Satu satunya upaya sistemik pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan yang sudah dilakukan sejak bulan April 2025 lalu adalah upaya merespon inisiatif Komisi X DPR RI untuk segera memulai pembahasan RUU Sisdiknas yang baru, sebagai penyempurnaan atas UU No. 20 Tahun 2003 yang masih berlangsung sampai sekarang.***



URGENSI HALUAN NEGARA BAGI PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA (NATION AND STATE BUILDING)

Pontjo Sutowo (Ketua Aliansi Kebangsaan)

Setelah amandemen UUD 1945 diberlakukan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan “Garis-garis Besar daripada Haluan Negara” (GBHN) dan dengan sendirinya meniadakan GBHN sebagai “haluan” pembangunan nasional. Sebagai gantinya, perencanaan pembangunan nasional kita dirancang berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004.

Sesuai dengan SPPN tersebut, proses perencanaan pembangunan untuk pencapaian tujuan nasional dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional jangka panjang. Sementara pembangunan lima tahunan yang seharusnya menjadi tahapan pelaksanaan secara berkelanjutan dari visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN tersebut, dirumuskan dengan rujukan utamanya adalah visi-misi Presiden/Wakil Presiden yang dipilih secara langsung melalui Pemilu kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan sistem perencanaan seperti ini, arah pembangunan nasional sangat ditentukan oleh visi-misi Presiden terpilih yang hanya berlangsung selama lima tahunan

Setelah dua dekade lebih Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tersebut diberlakukan, sejumlah persoalan mengemuka, mengindikasikan berbagai kelemahan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional kita. Berbagai kalangan memberikan catatan terkait SPPN tersebut antara lain adalah bahwa SPPN yang ada sekarang dinilai tidak mampu mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pembangunan antar waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintah, antar daerah, dan antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPPN juga dinilai bias terhadap

“
Yang dihindari bukan saja dikte-dikte diktator mayoritas, melainkan juga tirani minoritas dari oligarki elit penguasa dan pengusaha.



agenda Eksekutif karena kurang memberi ruang bagi peran serta masyarakat, komunitas, dan dunia usaha sehingga tidak mencerminkan wujud kehendak rakyat seperti halnya GBHN. Tentu masih ada catatan-catatan lain yang sudah sering kita dengar/baca.

Dengan berbagai catatan atas kelemahan SPPN tersebut, pembangunan nasional yang seharusnya merupakan gerak kemajuan secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan justru kerap kali membuat agenda pembangunan lebih banyak merespon hal-hal mendesak berjangka pendek yang seringkali bersifat tambal-sulam, dengan mengabaikan persoalan-persoalan fundamental yang berjangka panjang. Pengabaian hal-hal fundamental itulah sesungguhnya yang menjadi biang kemunculan aneka kelemahan, ketimpangan, dan ketertinggalan pembangunan kita yang melahirkan beragam ekspresi kekecewaan sosial.

Dengan merujuk sejumlah catatan kelemahan dan kekurangan dari SPPN tersebut, muncullah berbagai pemikiran dan desakan untuk melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional kita. Bahkan ada arus sangat kuat yang menghendaki untuk kembali menggunakan “model GBHN yang ditetapkan oleh MPR” seperti pernah berlaku dalam sistem perencanaan pembangunan kita di masa lalu.

Wacana menghidupkan kembali GBHN juga disampaikan oleh kalangan akademisi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sejak 2013, beberapa kali merekomendasikan revitalisasi GBHN atau “model haluan negara”. Forum Rektor Indonesia (FRI) sejak 2014 juga cukup intensif merekomendasikan dihidupkannya kembali bahkan menyusun Kajian Akademik GBHN yang sudah diserahkan kepada MPR dan mendorong MPR untuk menginisiasi amandemen konstitusi guna mencantumkan kembali kewenangan MPR menetapkan GBHN. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) pada tahun 2020 juga melakukan kajian “Urgensi dan Fisibilitas Model GBHN dalam Pembangunan Nasional”.

Untuk mengkaji lebih dalam tentang kemungkinan

restorasi “Haluan Negara”, Aliansi Kebangsaan sendiri pernah menyelenggarakan konvensi GBHN pada tahun 2016 yang dihadiri berbagai kalangan dan tokoh bangsa, serta FGD Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2019 yang lalu. Bahkan Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan MPRRI menyelenggarakan diskusi “Restorasi Haluan Negara” pada tanggal 9 November 2020 dan 3 Desember 2020 di Gedung MPRRI.

Sebagai respons atas aspirasi publik tersebut, MPRRI mulai melakukan serangkaian kajian dan meletakkan isu restorasi haluan negara dalam agenda-agenda persidangannya. Melalui pidato Ketua MPR dalam sidang tahunan 2019 menyatakan bahwa: “Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional “Model GBHN” melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Wacana restorasi Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara (Haluan Negara) terus menggelinding di ruang publik, meski belum jelas kemana ujungnya. Oleh karena itulah, saya merasa perlu untuk mengangkat kembali masalah yang sangat penting ini dalam artikel majalah digital Aliansi Kebangsaan untuk menjadi perhatian dan pemikiran segenap bangsa Indonesia. Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang diperjuangkan dan dirumuskan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Oleh karena itu, apapun pilihan Sistem Perencanaan Pembangunan yang kita anggap paling sesuai bagi Indonesia, sistem tersebut harus menjamin bahwa pembangunan yang kita laksanakan merupakan gerak berkelanjutan menuju pencapaian cita-cita nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan yang kita kembangkan harus mampu merancang pembangunan nasional sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat Indonesia serta menghadirkan kemerdekaan, ke-bersatu-an, ke-

berdaulat-an, keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Basis Sosial-Historis GBHN

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan konsensusnya sendiri menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Konsepsi tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan falsafah, pandangan hidup, serta faktor-faktor historis-sosiologis dari bangsa yang bersangkutan. Karenanya, pilihan-pilihan model ketatanegaraan, sistem hukum, dan kebijakan dasar yang dianut oleh suatu bangsa tidak harus identik dengan model-model yang berlaku di negara lain.

Sebagaimana pernah ditulis oleh Yudi Latif, Pakar Aliansi Kebangsaan di Harian Kompas (2016), keberadaan GBHN yang dimaknai sebagai konsepsi haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat tentu mempertimbangkan basis sosial-historis bangsa Indonesia. Terutama terkait dengan konsepsi (cita) Negara yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa yaitu Negara kekeluargaan dan Negara kesejahteraan.

Dibawah sistematis negara kekeluargaan, para pendiri bangsa memilih demokrasi konsensus (demokrasi permusyawaratan) bukan model: *"majoritarian democracy"* (demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas) dengan lebih menekankan pada daya-daya konsensus (mufakat) dalam semangat kekeluargaan. Demokrasi permusyawaratan ini berusaha untuk mengatasi paham perseorangan dan golongan. Yang dihindari bukan saja dikte-dikte diktator mayoritas, melainkan juga dikte-dikte tirani minoritas dari oligarki elit penguasa dan pengusaha.

Di dalam negara kekeluargaan dengan demokrasi konsensus ala Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, haluan direktif mengenai kebijakan dasar (rencana) pembangunan tidaklah diserahkan kepada Presiden sendirian sebagai ekspresi kekuatan majoritarian. Pembangunan nasional memerlukan peran negara sekaligus juga partisipasi masyarakat Indonesia yang multikultur. Pembangunan harus dilaksanakan melalui

inklusif yang non-diskriminatif, berdasarkan partisipasi masyarakat.

Kebijakan dasar rencana pembangunan harus dirumuskan bersama melalui mekanisme konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat dalam suatu lembaga perwakilan terlengkap, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan kata lain, Presiden tidak mengembangkan rencana pembangunan nasional sendirian, tetapi harus menjalankan prinsip-prinsip direktif yang ditetapkan MPR dalam suatu "Haluan Negara".

Selain mempertimbangkan pilihan sistem demokrasi, "model perencanaan pembangunan" Indonesia juga harus disesuaikan dengan sistem khas kenegaraan kita yaitu "Negara Kesatuan yang berbentuk Republik" dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus tetap merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, maka kebijakan pembangunan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah harus tetap merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah ketika merumuskan kebijakan pembangunannya hendaknya memperhatikan kepentingan nasional, dan sebaliknya Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan pembangunan harus memperhatikan kepentingan daerah dan kearifan lokal. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Fungsi dan Substansi GBHN

Kalau kita dalam alam pemikiran pendiri bangsa, usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasionalnya, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, haruslah bersandar pada tiga konsensus fundamental, yaitu: Pancasila sebagai falsafah/norma dasar, UUD sebagai hukum dasar, dan Haluan Negara sebagai kebijakan dasar. Bila Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, Konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif,

maka Haluan Negara mengandung prinsip-prinsip direktif (directive principles).

Nilai-nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak. Pasal-pasal Konstitusi juga kebanyakan mengandung norma-norma besar yang tidak memberikan arahan bagaimana cara pelebagaan dan pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan suatu kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi “arahan dasar” tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi tersebut ke dalam berbagai pranata publik, yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan secara terpimpin, terencana dan terpadu. Sebagai prinsip direktif, haluan negara itu juga harus menjadi pedoman dalam pembuatan perundang-undangan.

Dengan memahami maksud asal (*original intent*) para pendiri bangsa seperti itu, maka bangsa kita memerlukan semacam “Haluan Negara” yang memuat arahan dasar yang mengandung dua tuntunan, yaitu : haluan yang bersifat ideologis dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis. Haluan ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal Konstitusi ke dalam berbagai kebijakan publik, dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan lapisan. Sedangkan haluan strategis-teknokratis berisi pola perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan terpimpin dalam jangka panjang secara bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prioritas bidang dan ruang (wilayah).

Baik sebagai haluan yang bersifat ideologis direktif maupun haluan strategis-teknokratis, Haluan Negara mengandung tuntunan kebijakan dasar yang memadukan pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan negara (state building) dalam ranah Tata Nilai (mental-kultural), Tata Kelola (institutional-political atau kelembagaan sosial-politik), dan Tata Sejahtera (material-teknologikal).

Dengan demikian, Haluan Negara memiliki fungsi penting dalam mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan negara kesejahteraan sebagaimana dicitakan oleh para pendiri bangsa.

Dalam sistematika negara kekeluargaan, tentu GBHN mempunyai fungsi sebagai mekanisme demokrasi permusyawaratan dan alat komunikasi dengan rakyat, yang mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan daerah, serta ikut menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, “Haluan Negara” bersifat inklusif sebagai perwujudan kehendak seluruh rakyat, akan memperkuat ikatan ke-Indonesiaan kita dengan menghubungkan dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah.

Sedangkan dalam konsepsi Negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, “Haluan Negara” juga memiliki fungsi alokatif dalam pendistribusian aneka sumberdaya secara berkeadilan. Di dalam sistem kapitalisme, fungsi alokasi sumberdaya diserahkan pada mekanisme pasar, sedangkan dalam sistem etatisme, fungsi alokasi sumberdaya diserahkan pada kekuasaan Negara. Dalam sitem Pancasila, alokasi sumberdaya tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau kekuasaan negara, melainkan juga melalui mekanisme permusyawaratan rakyat dalam MPR sebagai lembaga yang paling lengkap keterwakilannya. Dengan prinsip-prinsip seperti itu, Haluan Negara pada akhirnya akan berfungsi memperkuat ikatan ke-Indonesiaan kita dengan tetap menghormati identitas kemajemukan demi tetap terjaganya persatuan bangsa.

Meluasnya dukungan publik terhadap usaha menghidupkan kembali Haluan Negara semacam GBHN mengindikasikan urgensi “Haluan Negara” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menghidupkan kembali Haluan Negara, tidaklah berarti bahwa format dan isi Haluan Negara harus sama dan sebangun dengan GBHN versi terdahulu. Yang penting, secara substansial, Haluan Negara sebagai kebijakan dasar harus memuat kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan-arahan dasar (directive principles) yang bersifat ideologis dan strategis-teknokratis dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional kita.

Dalam konteks untuk restorasi Haluan Negara sebagaimana disuarakan oleh banyak kalangan, revitalisasi MPR sebagai perwakilan yang terlengkap

dan inklusif tentu perlu dipertimbangkan, agar permusyawaratan mengenai Haluan Negara dapat menjadi ruang bersama perwakilan seluruh rakyat pemilik kedaulatan untuk menghimpun kepentingan sebesar-besarnya rakyat dalam membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi upaya kita memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Artikel Ini disarikan dari TOR dan Sambutan Ketua Aliansi Kebangsaan dalam FGD “Haluan Negara” yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan, Forum Rektor Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bersama MPR – RI pada tanggal 9 November 2020 dan 3 Desember 2020 di Gedung MPRRI.

(Pontjo Sutowo: Pengusaha Nasional, Ketua Aliansi Kebangsaan, Pembina YSNB, Ketua Umum FKKPI).



SAATNYA CENDEKIAWAN BICARA

Prasetijono Widjojo MJ

(Wakil Direktur Yayasan Dana Darma Pancasila)



Saat itu beberapa orang cendekiawan (*creative minority*) berbicara sebagai satu komunitas gerakan. Ketika itu, 20 Mei 1908, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Para dokter yang mempunyai *concern* terhadap persoalan bangsa dan terhadap masalah kebangsaan bergabung dalam satu organisasi yang dikenal dengan nama Boedi Oetomo. Gerakan tersebut menyadarkan seluruh bangsa bahwa Indonesia harus bangkit, melawan penjajahan, dan hal itu harus diperjuangkan. Boedi Oetomo didirikan oleh para pelajar STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen*) di bawah pimpinan R. Soetomo bersama para tokoh lain, antara lain dr. Wahidin Sudirohusodo dan M. Soeradji, pada akhir tahun 1907. Boedi Oetomo bergerak di bidang pendidikan, membangkitkan kesadaran akan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat ikatan kebangsaan agar tidak mudah diadu domba dan dipecah belah oleh penjajah. Boedi Oetomo berhasil membangkitkan kesadaran bangsa melalui pendidikan untuk membangun rasa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa yang cerdas akan mampu menentukan nasibnya sendiri sehingga bebas dari keterbelengguan dan tekanan penjajah, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Gerakan Boedi Oetomo pada tahap selanjutnya menjadi satu gerakan perjuangan kedaulatan. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda berkumpul di Jakarta dan menyatakan ikrar untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 semakin memperkuat gerakan kebangsaan dan perjuangan kedaulatan dengan bersumpah: berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia; serta menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Penguatan rasa kebangsaan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa semakin kokoh dengan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 yang kemudian disepakati sebagai Dasar Negara. Bangsa Indonesia menyepakati rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 menjadi rumusan yang selanjutnya dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi titik temu keberagaman bangsa, titik tumpu membangun peradaban, dan sekaligus titik tuju ke mana bahtera pembangunan akan berlabuh menuju masa depan yang gemilang. Pancasila menjadi dasar membangun Indonesia sebagai negara bangsa (*nation state*) untuk membangun di seberang jembatan emas kemerdekaan Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia pada akhirnya diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, dan mulailah bangsa Indonesia berjuang untuk mengisi kemerdekaannya. Tonggak-tonggak sejarah itulah yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju era modern sebagai satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedaulatan yang bahkan sampai saat ini masih harus diperjuangkan dalam era perang modern, perang generasi lima, yang tidak lagi mengutamakan kekuatan militer, tetapi dengan alat yang lebih canggih, yaitu teknologi.

Salah satu hal yang menyebabkan tata kelola pembangunan menghadapi banyak persoalan adalah selama ini pembangunan (*developmentalist regime*) pendekatannya masih berat kepada *resource-based development* dan belum bergeser kepada *knowledge-based development*. Pembangunan di era Soekarno lebih berorientasi kepada membangun semangat patriotisme, semangat antikolonialisme, dan imperialisme dalam segala bentuknya. Dana rampasan perang

digunakan untuk membangun proyek-proyek mercusuar agar rakyat selalu ingat akan sejarah bangsanya.

Pada era Suharto, pembangunan sering dikatakan lebih sentralistik dan represif (*repressive developmentalist*) yang berorientasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan semangat Trilogi Pembangunan, Suharto mencapai pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, rata-rata 7 persen dalam kurun waktu lebih dari tiga dekade. Suharto mengendalikan stabilitas dengan selalu menjaga kebutuhan dasar rakyat, khususnya sembilan bahan pokok (sembako), serta mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Dalam ranah tata nilai, rezim Orde Baru melaksanakan program Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk sosialisasi dan internalisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila. Suharto didukung oleh kekuatan para cendekiawan, para teknokrat yang dikenal dengan nama *Berkeley Mafia* di bawah komando begawan ekonomi Widjojo Nitisastro.

Pemerintahan Suharto meyakini bahwa dengan Trilogi Pembangunan (pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan), hasil-hasil pembangunan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintahan Orde Baru meyakini akan terjadi *trickle-down effect* dari hasil-hasil pembangunan. Modal asing mulai masuk ketika disahkan Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1967. Namun, *technology transfer* masih jauh dari harapan dan sebagian besar rakyat masih hidup dalam kemiskinan dan kerentanan. Ketimpangan juga masih dijumpai, baik menurut lapisan pendapatan maupun secara kewilayahan. Pembangunan masih diwarnai dengan pendekatan yang bersifat ekstraktif dan produk komoditas masih menjadi andalan. Sentuhan teknologi sudah ada, walaupun masih sangat kurang.

Kemajuan pembangunan dapat diakselerasi dengan penguatan penguasaan teknologi. Rakyat harus diberi empowerment agar menguasai teknologi kalau ingin maju. Jangan harap *transfer of technology* akan segera terjadi dengan mengadopsi *foreign investment*. Iptek harus diperjuangkan untuk dikuasai. Negara-negara yang sekarang maju

pesat tidak peduli apa ideologinya. Negara-negara seperti Amerika (kapitalis), China (komunis), Jepang, Korea Selatan, dan Jerman mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju karena penguasaan teknologi. Mereka menguasai teknologi sebagai pengungkit kemajuan peradabannya serta peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Seharusnya kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak berat kepada model bagi-bagi bansos, tetapi lebih baik dengan bagi-bagi *knowledge* agar rakyat lebih produktif dan ada pemberdayaan (*empowerment*). Sehingga, untuk itu, penelitian, upaya-upaya inovasi, penguatan kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat harus terus didorong untuk akselerasi kemajuan pembangunan. Kalau teknologi dikuasai, uang akan mengikuti, akan datang. Sebagai negara yang demokratis, rakyat harus dilibatkan seluas mungkin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan peradaban harus inklusif (dari, oleh, dan untuk rakyat), *no one left behind*. Sehingga keadilan tidak hanya dilihat dari distribusi pendapatan (*income distribution*), tetapi juga akses dan kesempatan yang adil kepada rakyat. Agar rakyat mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, rakyat harus di-*empower* dengan *knowledge*.

Kalau teknologi dikuasai, tentunya diraih dengan perjuangan, akan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi akselerasi pembangunan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Sudah 20 tahun lebih Indonesia masih berada dalam *middle income trap* karena teknologi belum dikuasai. Bahkan untuk garam saja masih impor. Kinerja perusahaan BUMN sering hanya dilihat dari sisi keuangan saja (*financial health*), padahal tidak semua BUMN bergerak di bidang keuangan. Banyak BUMN yang harus melayani sektor riil (*serving real sector*), sehingga mereka secara langsung juga menjadi *agent of development*. Frasa “dikuasai oleh negara” seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 perlu dikaji secara jernih dan lebih mendalam, apa yang dimaksud oleh para *founding fathers* ketika menyusun UUD 1945.

Indonesia dikaruniai Tuhan kekayaan alam yang luar biasa. Sudah menjadi kodrat, Tuhan

mengaruniai bangsa Indonesia dengan banyak kelebihan yang luar biasa, seperti: Indonesia adalah negara kepulauan; Indonesia adalah bangsa yang bhinneka (majemuk, beragam) di banyak aspek seperti budaya, bahasa, potensi alam, dan sebagainya; Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam (dilingkari cincin api dan terletak pada pertemuan lempeng bumi), abu gunung berapi menjadikan tanah Indonesia tanah yang subur; Indonesia sebagian besar areanya adalah laut (bahari) dengan kekayaan biota lautnya; serta Indonesia mempunyai letak yang strategis (di antara dua benua dan dua lautan) sehingga sangat menentukan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia.

Daftar tersebut masih bisa ditambah. Yang penting adalah hal-hal tersebut seharusnya menjadi patokan (pertimbangan utama) dalam membangun peradaban bangsa. Para ilmuwan dan para cendekiawan seharusnya bisa berperan dengan terus menggali teknologi apa dan bagaimana penerapannya dengan kondisi kodrat Indonesia tersebut.

Ikatan politik kebangsaan sudah dicanangkan lewat Sumpah Pemuda: satu bangsa, satu tanah air, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian pandangan hidup bangsa dan dasar negara Pancasila sudah disepakati sebagai spirit atau nilai yang menjiwai pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Benang merah persatuan sudah disepakati dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Tidak dharma yang mendua. Inilah benang merah kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri bangsa yang sudah seharusnya dijaga, dirawat, dan diperkuat, apalagi menghadapi perang modern yang sedang berlangsung. Cendekiawan bisa berperan dengan menjabarkan Pancasila bagaimana operasionalisasinya, bagaimana menjabarkan Pancasila sebagai ideologi kerja. Sekarang saatnya “Cendekiawan Bicara” untuk Kebangkitan Nasional Kedua.

Dengan bekal kesepakatan bangsa (Sumpah Pemuda, Pancasila, Proklamasi, dan Bhinneka Tunggal Ika) dan ditambah dengan penguasaan teknologi, maka bangsa Indonesia akan mampu

menentukan nasib sendiri, bahkan akan mampu berperan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Syarat yang juga teramat penting adalah adanya strong leadership, yaitu kepemimpinan yang visioner, mampu mempersatukan Indonesia yang bhinneka, negarawan, dan seterusnya. Semoga bermanfaat.***



PEMERINTAHAN

Prabowo dan Demokrasi Pancasila

Oleh **Nofia Fitri**
(Sekretaris Yayasan Dana Darma Pancasila)

Demokrasi merupakan pengejawantahan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Namun pengalaman demokrasi Indonesia pasca-reformasi menunjukkan bahwa demokrasi electoral di lapangan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi substansial dalam prinsip-prinsip yang ideal. Secara prosedural, pemilu berlangsung reguler dan kompetitif. Namun, secara substansial masih menyisakan berbagai persoalan mendasar yang menggerogoti kedaulatan rakyat (Dahl, 1989; Diamond, 1999).

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berada dalam cengkeraman oligarki dan kartel politik, sebagaimana dipaparkan dalam bagian ranah Tata Kelola, buku “Memperadabkan Bangsa, Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia” misalnya. Buku ini dihasilkan dari proses diskusi panjang dan penelitian kepustakaan Aliansi Kebangsaan. Proses pemilu yang padat modal membuka ruang luas bagi politik transaksional, klientelisme, dan dominasi elite ekonomi dalam arena



politik (Winters, 2011; Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam kondisi demikian, hasil pemilu memang sah secara hukum, namun legitimasi substantifnya kerap dipertanyakan. Demokrasi kemudian direduksi menjadi mekanisme perebutan kekuasaan, bukan sarana kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 (Yudi Latif, 2020).

Evaluasi pemerintahan dalam seri tulisan ini bukanlah penilaian terhadap kinerja teknokratis sektoral, melainkan sebagai evaluasi kebijakan dalam kerangka tata kelola demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, ukuran evaluasi tidak berhenti pada efektivitas kebijakan, tetapi juga mencakup legitimasi partisipatoris, struktur kekuasaan yang mendasarinya, serta kesesuaian arah kebijakan negara dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara (Latif, 2022). Dengan kerangka tersebut, pemerintahan Presiden

Prabowo Subianto yang mulai menjabat sejak Oktober 2024 perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem demokrasi yang telah lama dikritik, sekaligus sebagai aktor yang memiliki otoritas untuk melakukan koreksi struktural setelah memegang tampuk kekuasaan.

Pemerintahan Prabowo sebagai Produk Demokrasi Prosedural

Pemerintahan Prabowo tidak lahir di ruang hampa. Ia merupakan produk langsung dari sistem pemilu dan kepartaian yang selama ini ditandai oleh mahalanya biaya politik, lemahnya kaderisasi partai, serta kuatnya peran oligarki dalam menentukan arah kekuasaan (Mietzner, 2013; Ambardi, 2009). Dalam konteks ini, legitimasi elektoral yang diperoleh melalui pemilu tidak serta-merta menjamin hadirnya pemerintahan yang demokratis secara substantif. Tantangan utama pemerintahan Prabowo bukan terletak pada legalitas kekuasaan, melainkan pada bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk kepentingan siapa kebijakan tersebut dirumuskan.

Menguatnya persepsi publik bahwa kebijakan negara lebih banyak dirumuskan oleh elite politik dan teknokrat, sementara aspirasi rakyat hadir sebagai pelengkap formal, menunjukkan adanya jarak partisipatif antara negara dan warga. Fenomena ini sejalan dengan temuan banyak studi yang menilai bahwa demokrasi Indonesia mengalami gejala *democratic backsliding*, di mana prosedur demokrasi tetap berjalan, tetapi partisipasi substantif warga negara semakin terpinggirkan. Kondisi ini menjadi persoalan serius dalam demokrasi Pancasila, yang menempatkan rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek utama dalam proses pengambilan keputusan (Latif, 2015).

Koalisi Besar dan Melemahnya Fungsi Representasi

Salah satu ciri menonjol pemerintahan Prabowo pada fase awal adalah terbentuknya koalisi politik yang sangat besar di parlemen. Dari sudut pandang stabilitas pemerintahan, koalisi ini memang mengurangi potensi konflik terbuka antara eksekutif dan legislatif. Namun, pembentukan koalisi besar sejatinya merupakan pilihan kebijakan politik,

bukan fakta netral dalam konstalasi sesungguhnya. Pilihan ini membawa konsekuensi serius terhadap kualitas representasi dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi (Lijphart, 1999). Tuntutan masyarakat akan pentingnya oposisi meningkat, sampai kepada seruan dan dukungan kepada kandidat-kandidat kalah pemilu untuk terjun aktif mengawasi pemerintahan muncul luas di berbagai kanal media sosial.

Koalisi yang terlalu besar cenderung melahirkan praktik kartel politik, di mana partai-partai akan lebih berorientasi pada pembagian kekuasaan dibandingkan pengartikulasian kepentingan rakyat. DPR berisiko kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi institusi yang lebih bersifat akomodatif terhadap kepentingan eksekutif. Dalam perspektif sila ke-empat Pancasila, kondisi ini problematik karena demokrasi permusyawaratan mensyaratkan adanya dialektika gagasan dan kepentingan rakyat, bukan sekadar konsensus elite yang tertutup (Latif, 2022).

Evaluasi Pemerintahan dalam konteks ini menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia hari ini bukan pada stabilitas politik semata, melainkan pada melemahnya legitimasi partisipatoris. Kebijakan yang lahir dari proses elitis dan minim musyawarah publik tetap problematik, meskipun efektif secara administratif (Dryzek, 2000).

Negara Kuat dan Etika Kekuasaan

Latar belakang Prabowo sebagai figur dengan pengalaman panjang di sektor pertahanan turut membentuk orientasi pemerintahan yang menekankan pentingnya negara yang kuat dan stabil. Dalam batas tertentu, negara yang kuat memang diperlukan untuk menjamin ketertiban, kedaulatan, dan efektivitas pemerintahan. Namun dalam paradigma Pancasila, negara kuat bukanlah negara yang dominan atas rakyat, melainkan negara yang memperoleh kekuatannya dari kepercayaan dan partisipasi rakyat (Latif, 2015).

Hingga akhir 2025, penguatan peran negara belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan peran masyarakat sipil. Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan masih cenderung bersifat konsultatif formal, bukan deliberatif substansial.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan menyempitnya ruang kebebasan sipil dan ekspresi politik, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi mengenai relasi negara dan masyarakat sipil di Indonesia (Hadiz, 2010; Aspinall, 2014). Dalam perspektif sila kedua Pancasila, kekuasaan negara harus dijalankan secara beradab dan menjunjung martabat manusia. Negara yang kuat secara institusional, tetapi lemah dalam penghormatan terhadap hak-hak warga, berpotensi menjauh dari cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kebijakan Ekonomi dan Tantangan Keadilan Sosial

Di bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Prabowo melanjutkan agenda pembangunan nasional dengan penekanan pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan penguatan ekonomi nasional. Secara makro, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan posisi Indonesia dalam persaingan global. Namun dalam perspektif Pancasila, kebijakan ekonomi tidak dapat dinilai netral. Ia selalu memihak—entah pada kepentingan modal (baca kapitalisme) atau pada kepentingan rakyat (Polanyi, 1944; Latif, 2022).

Kritik publik menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata, khususnya oleh kelompok masyarakat bawah dan wilayah pinggiran. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan struktural yang belum terjawab secara memadai. Oleh karena itu, sila kelima Pancasila menuntut agar keadilan sosial dijadikan tolak ukur utama dalam evaluasi kebijakan ekonomi, bukan sekadar pertumbuhan atau stabilitas makro.

Agenda Reformasi Politik yang Belum Menjadi Prioritas

Krisis demokrasi Indonesia salah satunya berakar pada kegagalan sistem pemilu dan kelembagaan partai politik. Hingga akhir 2025, pemerintahan Prabowo belum menempatkan reformasi politik—khususnya reformasi partai politik dan sistem pemilu—sebagai agenda kebijakan utama. Padahal tanpa pembenahan mendasar terhadap institusi politik, kebijakan publik apapun akan terus dihasilkan melalui mekanisme yang bias elite dan minim partisipasi rakyat.

Dalam perspektif Pancasila, reformasi politik melalui perbaikan kelembagaan partai serta peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan prasyarat bagi terwujudnya demokrasi permusyawaratan yang sesungguhnya. Negara tidak cukup hanya kuat dan efektif, tetapi harus mampu memfasilitasi keterwakilan rakyat secara adil dan bermakna. Reformasi partai politik, pendanaan partai oleh negara, penguatan demokrasi internal partai, serta penataan sistem pemilu menjadi agenda mendesak yang menentukan kualitas pemerintahan ke depan sebagaimana di tekankan pada Buku “Memperadabkan Bangsa”.

Kerja pemerintahan Prabowo hingga akhir 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama pemerintahan ini tidak terletak pada stabilitas politik atau efektivitas kekuasaan, melainkan pada kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi prosedural yang oligarkis menuju demokrasi Pancasila yang substantif. Dalam negara Pancasila, kekuasaan selalu bersifat moral, konstitusional, dan partisipatoris. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya akan diukur bukan dari seberapa kokoh kekuasaan dipertahankan, melainkan dari sejauh mana kekuasaan tersebut digunakan untuk memperluas kedaulatan rakyat, memperkuat keadilan sosial, dan menghidupkan kembali demokrasi permusyawaratan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. ***

“

“Tantangan utama pemerintahan Prabowo bukan terletak pada stabilitas politik atau efektivitas kekuasaan, melainkan pada kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi prosedural yang oligarkis menuju demokrasi Pancasila yang substantif.”

KEADILAN:

Sari Pati Kemanusiaan

Oleh **Ahmad Zacky Siradj**
(Sekjen Aliansi Kebangsaan)

Dapat dipastikan bahwa bangsa-bangsa di dunia ini bercita-cita untuk mewujudkan keadilan. Kukuh, kuat, dan ajegnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh keadilan terwujud dalam kehidupan masyarakat bangsanya. Demikian pula kiranya, terpuruk dan hancurnya bangsa-bangsa di dunia, karena diakibatkan tidak terjamin dan tidak terselenggaranya keadilan ditengah masyarakat bangsanya.

Pengalaman sejarah menunjukan bahwa salah satu penyebab terjadinya revolusi sosial yang dialami oleh sebagian masyarakat bangsa di dunia ini, diantaranya karena keadilan telah ternodai. (Revolusi Perancis 1789-1799, diantaranya). Hukum yang seharusnya tegak demi menjamin harmoni dan ketentraman hidup masyarakat, telah ternoda dan berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat. Pemimpin yang tuna moral cenderung ingin melanggengkan kekuasaannya dengan menyiasati hukum bagi kepentingannya. Sehingga konflik di masyarakat sering muncul dan tak terhindarkan.

Cita-cita keadilan dan ikhtiar mewujudkannya menjadi bagian pula dari keberagamaan. Tiada sedikit para pimpinan dan tokoh-tokoh agama pun yang memperjuangkan untuk bagaimana keadilan itu wujud di tengah kehidupan masyarakat bangsa. Hal ini karena masih senjangnya antara cita-cita moral agama dengan perbuatan para penganut agama. Padahal semua menyadari bahwa memperjuangkan keadilan merupakan bukti cinta kasih sesama manusia.



Namun begitu kenyataan berkata beda yaitu ada saja yang menodai jalan keadilan. Penegakan hukum misalnya, termasuk petugas dan penegaknya, yang semula diharapkan sebagai ujung tombak untuk mewujudkan keadilan, nyaris melawan dan meruntuhkan pilar keadilan itu sendiri. Hukum telah diperdaya menjadi alat kekuasaan. Penindasan dimana-mana. Nilai kemanusiaan telah tercampakan, menggelepar bagai ikan didaratan.

Semua berharap, namun pada saat yang sama beririsan dengan keraguan, kemudian muncul distrust society atau public distrust, tidak percayanya publik terhadap elite, terhadap pemimpinnya. Masihkan ada harapan? Bila kemudian penegakan hukum masih bisa dibayar dan dibeli?

Memang ada semacam panggilan terhadap kaum cendekiawan yang masih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Hati nurani, moral dan pengetahuan, hingga bukti kesungguhan perjuangannya, senantiasa dinanti masyarakat. Mungkin terjembatani? Semoga!

Cakrawala Kebangsaan



Good Governance Kewirausahaan Indonesia

Oleh **Dr. Susetya Herawati**

(Dosen dan Pegiat Ekosistem Kewirausahaan Pemuda)

Tak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini kewirausahaan menjadi “instrumen” untuk mengatasi masalah pengangguran, dan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi suatu masyarakat dan bangsa. Berbagai alternatif kebijakan pun dirumuskan untuk mendorong tumbuhnya jumlah wirausaha baru. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pengembangan kreatif, terus dipacu untuk menjadikan bisnis dengan nilai tambah yang lebih besar. Proporsi wirausaha terhadap populasi penduduk dalam suatu negara pun menjadi salah satu tolok ukur cukup penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Ketahanan dan daya saing sebuah bangsa tercermin dari kondisi kewirausahaan. Tak berlebihan adanya keyakinan bahwa kondisi kewirausahaan juga mencerminkan ketahanan sebuah bangsa. Maka pada hakikatnya, pengembangan kewirausahaan pun memiliki dua dimensi, yakni dimensi pengembangan ekonomi dan dimensi penguatan ketahanan nasional. Sebuah keniscayaan bahwa penguatan ekonomi masyarakat merupakan satu perspektif membela negara. Hambatan dan ancaman suatu bangsa dihadapi dengan peningkatan kekuatan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan.

Pengembangan kewirausahaan adalah proses internalisasi sekumpulan sifat-sifat wirausaha menjadi sikap dan perilaku seseorang.

Pengembangan Kewirausahaan adalah proses *character building* atau pendidikan akhlak yang akan menghasilkan generasi yang berkarakter mulia karakteristik wirausaha. Indonesia saat ini tengah mendapatkan “berkah” bonus demografi dengan kondisi penduduk berusia produktif lebih besar. Sementara itu jumlah populasi usia pemuda cukup besar dengan potensi kreativitas, intelektual, talenta dan karakteristik pemuda yang dimiliki memberikan harapan kegemilangan Indonesia di masa yang akan datang, bila saja potensi tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan efektif. Selain potensi positif, juga terdapat potensi negatif atau destruktif. Pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda merupakan alternatif terbaik untuk memanfaatkan bonus demografi menjadi berkah dengan mengembangkan potensi positif.

Penyiapan strategi “pendidikan” yang efektif dengan pendekatan sistemik amat dibutuhkan untuk “membuat” pemuda tertarik menjadi wirausaha. Langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk membangun ekosistem pengembangan

kewirausahaan. Cukup banyak regulasi yang telah dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan di bidang pengembangan kewirausahaan selama ini namun pada tataran implementasi masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Diantara kendala tersebut adalah lemahnya keterkaitan antar kebijakan diantara aktor (instansi pemerintah) pada tingkat pusat, keterpaduan pusat dan daerah, dan keterpaduan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat yang disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia perumus dan pelaksana kebijakan yang tidak memadai. Untuk melakukan perbaikan dimaksud maka diperlukan cara pandang dan cara pendekatan yang lebih baik dan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman. Para pelaku pengembangan kewirausahaan dituntut untuk senantiasa kreatif dan inovatif dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan.

Untuk itu, tata kelola pemerintahan yang baik pada program pengembangan kewirausahaan ini sangat penting dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya, seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat, yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Good dalam pemerintahan yang baik mengandung pemahaman, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Governance* telah kita kenal dalam menunjuk hubungan antara pemerintah/negara dengan warga negaranya, sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi.

Fase *Good Governance* merupakan proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dan lain lain) dalam suatu negara, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat, *Rule*

of Law, transparansi, *responsiveness*, *consensus oriented*, *equity* yang *inclusiveness*, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, nilai-nilai tersebut dirancang dalam tata kelola kepemudaan yang baik dengan memberikan program, salah satunya pengembangan kewirausahaan pemuda. Pemuda mendapatkan pelayanan yang baik melalui usaha penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan, dengan harapan mampu menjadi pemuda yang berperan dalam pembangunan yang memiliki karakter, kemampuan daya saing dan mandiri.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam tata pemerintahan yang baik mengharapkan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non-negara dalam satu usaha kolektif. Dalam membangun kewirausahaan pemuda diperlukan tiga syarat sesuai, yaitu adanya kesempatan, kemampuan, keamanan, dan perlunya semua pihak agar mendukung gerakan ini, dan tiga syarat tersebut dapat dipenuhi apabila posisi dunia usaha/swasta dan masyarakat setara. Dengan keterlibatan yang setara tersebut, Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan memiliki peran yang tidak lagi dominan, pemerintah akan berfungsi sebagai regulator atau fasilitator. Dengan peran pemerintah yang semakin berkurang ini hendaknya direspon oleh para pemuda aktif peran dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat diartikan peran pemerintah, swasta/dunia usaha dan Pemuda menjadi lebih seimbang.

Pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dihindari. Dari aspek pemerintahan, sangat diharapkan perannya dalam : a, Hukum (kebijakan) ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.; b. Kompetensi administrasi dan transparansi, kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi, keterbukaan informasi; c. Desentralisasi. Desentralisasi regional

dan dekonsentrasi di dalam departemen; d. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Setiap pelaku *good governance* memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara. Pemerintah berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global. Sektor swasta/dunia usaha berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran swasta ini sangat penting perannya dalam penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Pemuda sebagai masyarakat (*civil society*) berperan memfasilitasi gerakan-gerakan kelompok pada masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Perubahan yang bersifat lokal dan nasional tersebut dapat mempengaruhi pola pemerintahan, terjadi pula pada tingkat regional dan global. Oleh karena itu, untuk membangun landasan yang kuat, pemerintah perlu melakukan perenungan kembali (*rethinking government*), yang kemudian diikuti dengan *reinventing government* untuk menciptakan pemerintahan baru yang lebih baik.

Orientasi pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah yang sangat dipengaruhi oleh perubahan di tingkat lokal, nasional, regional-global telah memaksa berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk mengadakan penyesuaian dalam menggali potensi daerahnya, agar mempunyai daya saing dan mampu memasarkannya. Untuk memberikan

pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (*service making*), tidak dikendalikan oleh harga pasar, dan dalam kegiatannya selalu ditujukan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat banyak (*social welfare*).

Dan hasil pelaksanaan pelayanan yang dilakukan tergantung pada penilaian masyarakat banyak. Pemuda sebagai aset penting dalam pembangunan di daerah harus melakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, dengan cara mentransformasi pendekatan dan cara pandang pemerintah daerah dan pemudanya dalam sistem otonomi daerah, dengan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi, terutama yang berhubungan dengan upaya-upaya penggalan sumber-sumber pendapatan.

Pemerintah Daerah harus mampu menggali potensi-potensi daerahnya secara optimal dan mengembangkan secara inovatif dari potensi-potensi yang ada. Pemuda memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut sebagai masyarakat yang tinggal di daerah itu dengan perannya. Orientasi pengelolaan daerah atau desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah keberaniannya melakukan mentransformasi diri pada berbagai perubahan, yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi dalam pengelolaan daerah, mentransformasi diri dari bureaucratic-monopolistic government menjadi entrepreneurial competitive government, dari "cuek-bebal" menjadi customer-driven government dan accountable government, dan dari local orientation menjadi global-cosmopolit orientation.

Pemuda sebagai Agen Perubahan

Transformasi di dalam sistem pemerintahan daerah atau pemerintahan desa menjadi *Entrepreneurial government* ini menjadi transformasi juga pada diri pemuda sebagai agen perubahan bukan lagi mencari kerja, tapi memiliki pemikiran untuk selalu berpikir dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk memakmurkan dan meningkatkan kualitas hidup pada diri sendiri dan masyarakat di lingkungannya. Sedangkan pemahaman pada *competitive government* juga memberikan pemahaman bagi kaum muda untuk terus melakukan kompetisi dalam setiap persaingan

dengan dunia luar, sedangkan pada pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakatnya. Transformasi selanjutnya adalah *customer-driven government*, dimana pemerintah daerah selalu berorientasi dan peduli terhadap setiap kebutuhan pelanggannya secara serius, akan memberikan keinginan dan harapan dari pelanggannya dan akan merespon dalam rangka memuaskan pelanggannya. Sistem yang berorientasi pada pelanggan memaksa pemberi jasa untuk dapat bertanggung jawab kepada pelanggannya.

Dalam perspektif pemuda wirausaha, transformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik pada pelanggannya, dalam hal ini masyarakat, adalah memberikan pandangan untuk para pemuda berpikir pada hal yang sama, yakni kewirausahaan pemuda yang melibatkan semua masyarakat, tanpa membedakan ras, agama, status sosial, dan pendidikan. Hal ini merupakan langkah yang baik untuk dicermati dan dikembangkan dalam tataran pemikiran maupun dalam implementasinya, di tengah-tengah Pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan.

Pelayanan publik yang dipraktekkan dengan situasi yang kreatif, di mana warga negara dan pejabat publik dapat bekerja sama mempertimbangkan tentang penentuan dan implementasi dari birokrasi publik, yang berorientasi pada "aktivitas administrasi dan aktivitas warga negara". Selanjutnya, Pemuda sebagai *citizen* harus melakukan kegiatan ini dengan satu kesadaran penuh sebagai warga negara yang memiliki peran dalam menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan terlibat aktif menjadikan dirinya bukan beban sosial karena menganggur akibat sempitnya lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah atau sempitnya lahan pertanian sebagai tanah olahan, tetapi menjadi pemuda yang memiliki kesadaran penuh untuk membangun daerahnya, dan tidak hanya menuntut pelayanan saja dari pemerintah, akan tetapi bersama-sama pemerintah memajukan daerahnya.

Disinilah pemuda dengan kesadaran sebagai warga negara melakukan inisiasi, partisipasi dan bahkan

emansipasi dalam pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi, demi mencapai ketahanan ekonomi dalam mensejahterakan dirinya dan lingkungannya. Dalam mewujudkan *Good Governance* Kewirausahaan Pemuda Indonesia penting melakukan komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat (pemuda). Selain komitmen bersama, juga dibutuhkan kepemimpinan yang mampu memberikan atau mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program.





PELUNCURAN BUKU

Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?: Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara Sebagai Pandu Masa Depan

Buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?” adalah ikhtiar besar untuk menyingkap makna alam, manusia, dan peradaban Indonesia bagi dunia, bukan sekadar cermin pengingat kejayaan, melainkan lentera yang membangunkan kembali rasa arah dan harga diri bangsa. Ia mengetuk pula nurani dunia: bahwa peradaban global tak pernah berdiri sendiri. Ada sumbangsih Indonesia yang kerap hadir tanpa dikenali, memberi tanpa sempat dihargai.

Upaya ini bukan untuk mengultuskan masa lampau, melainkan menegaskan keadilan pandang. Atas nama kasih Sang Pencipta, mustahil Ibu Semesta menakdirkan satu belahan bumi sebagai tunggal pusat cahaya, sementara belahan lain hanya menjadi bayang-bayang.

Sejarah yang sering digambarkan mengalir satu arah—dari Barat ke Timur—perlu dibaca ulang. Peradaban bukan garis lurus, melainkan arus perjumpaan: saling belajar, saling memperkaya, saling menyempurnakan. Di sana lah lahir kemajuan yang berkeadilan—warisan bersama umat manusia.

Penulisan ini pun, tambahannya, bukan pemujaan abu sejarah, melainkan pencarian api pelajaran. Join the past to build anew! Sebagaimana pelari yang mundur sejenak untuk mengumpulkan tenaga, demikian kebudayaan kadang perlu menoleh, bukan untuk tenggelam dalam nostalgia, melainkan untuk menemukan daya bagi lompatan ke depan.



Yudi Latif, Ph.D (Penulis Buku)

Dalam dua puluh dua bagian narasi, buku ini menampilkan kekayaan, kekhasan dan kontribusi alam, manusia serta peradaban Nusantara dalam bentangan sejarah dunia.

Namun, ketika kilau itu meredup dalam diskontinuitas dan kehilangan vitalitas, kita perlu memeriksa akar-akar sejarahnya. Kebijakan domestik aktif kolonial, ditambah tata kelola politik, ekonomi, dan budaya pascakolonial yang kurang sehat, telah memicu disrupsi dan kelembaman peradaban.

Karena itu, setiap bagian buku ini bukan hanya menyingkap anugerah dan potensi, tetapi juga mengingatkan kerentanan, tantangan, dan ancaman yang mesti dihadapi—agar cahaya masa lalu sungguh menjadi energi kebangkitan bagi masa depan.

Yudi Latif mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para sahabat pembaca, para penjaga makna, yang dengan penuh cinta telah meniupkan nafas kehidupan ke dalam karyanya ini, atas sambutan yang begitu hangat, agar Indonesia tidak hanya diingat sebagai nama di peta, melainkan dihayati sebagai denyut peradaban dunia.

Ia mengharapkan, semoga setiap halaman buku ini menjadi doa, agar kita belajar mencintai Indonesia bukan dengan kebisingan slogan, melainkan dengan kesunyian yang mengakar, seperti pohon yang tahu arah matahari tanpa banyak bicara. “Semoga buku ini menjadi jembatan bagi dialog batin kita tentang Indonesia, tentang Tanah Air yang bukan semata peta dan sejarah, melainkan juga denyut kasih, gema doa, dan desah pengharapan.”

Buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?” mengajak kita menelusuri kembali mosaik kontribusi bangsa ini bagi dunia, melalui sains, budaya, dan nilai kemanusiaan yang luhur. Yudi Latif menulisnya dengan ketelitian seorang peneliti dan keindahan seorang sastrawan, menampilkan bahwa setiap lapisan geologi, setiap naskah kuno, setiap rempah dan jamu, bahkan setiap bahasa yang kita ucapkan, adalah bagian dari kontribusi

besar Nusantara terhadap peradaban global.

“Sebagai bangsa yang tengah melangkah menuju Indonesia Emas 2045, kita perlu menatap masa depan dengan kesadaran historis yang kuat, bahwa signifikansi Indonesia di masa depan harus setara, bahkan melampaui, signifikansinya di masa lalu. Di sinilah pendidikan tinggi, sains, dan teknologi memainkan peran strategis. “Diktisaintek Berdampak” bukanlah sekadar semboyan, melainkan gerakan untuk menyalakan kembali obor kontribusi bangsa—agar ilmu pengetahuan yang tumbuh di tanah air tidak berhenti di laboratorium, tetapi memberi manfaat bagi kemanusiaan.

Dia berharap buku ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Indonesia bukan hanya relevan, tetapi diperlukan dunia. Dan tidak ada alasan sedikitpun bagi para ilmuwan, intelektual, dan cendekiawan Indonesia untuk merasa kecil di tengah percaturan global. Sebaliknya, kita harus berdiri tegak—melanjutkan epos sumbangsih cerlang Nusantara sebagai pandu masa depan umat manusia.

Buku ini dipersembahkan bagi siapa pun yang terpenggil untuk memahami sejarah panjang kealaman, kemanusiaan, dan peradaban Nusantara sebagai taman sari dunia dan akar jati diri bangsa. Ia menyapa pembaca umum, pelajar, dan mahasiswa, sekaligus relevan dalam konteks nation building, diklat kepemimpinan, pendidikan bela negara, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selama ini, wawasan kebangsaan cenderung ditempatkan dalam bingkai ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Buku ini hadir untuk menawarkan perspektif berbeda: bahwa seluruh disiplin ilmu dan ranah kehidupan—dari sains hingga seni, dari alam hingga kebudayaan—dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan kewargaan.

Lebih jauh, buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik. Dalam mengajarkan ilmu apa pun, kontekstualisasi dengan potensi dan realitas keindonesiaan, hendaknya selalu disisipkan, sehingga peserta didik dapat menautkan kecintaan pada ilmu dengan kecintaan pada tanah air—sebagai satu tarikan nafas yang utuh.



Bagi para pembaca di luar Indonesia, buku ini dapat menjadi jendela untuk melihat bahwa peradaban dunia tidak pernah dibangun oleh satu bangsa atau satu kawasan semata. Ia selalu lahir dari perjumpaan, pertukaran, dan sumbangan lintas bangsa. Dengan menyingkap sumbangsih Indonesia yang kerap terabaikan, buku ini mengajak masyarakat dunia untuk lebih menghargai prinsip saling memahami, saling mengakui, dan saling menumbuhkan—sebuah etos yang amat dibutuhkan demi lahirnya dunia baru yang lebih inklusif, setara, dan berkeadaban.

Melalui 22 bagian, buku ini menguraikan betapa luas dan dalamnya signifikansi Indonesia bagi dunia. Dengan melintasi beragam bidang dan disiplin ilmu, buku ini merangkai sebuah mosaik yang utuh: potret signifikansi alam, manusia, dan peradaban Indonesia bagi dunia. Sebuah mosaik yang bukan hanya memperdalam wawasan Nusantara, melainkan juga meneguhkan rasa percaya diri kolektif: jika di tanah air yang sama leluhur Nusantara pernah menjadi bangsa pelopor, mengapa generasi hari ini tidak dapat mengulanginya, bahkan melampauinya, untuk menyalakan fajar peradaban baru?

Dikatakan, buku ini dipersembahkan bagi siapa pun yang terpanggil untuk memahami sejarah panjang kealaman, kemanusiaan, dan peradaban Nusantara sebagai taman sari dunia dan akar jati diri bangsa. Ia menyapa pembaca umum, pelajar, dan mahasiswa, sekaligus relevan dalam konteks nation building, diklat kepemimpinan, pendidikan bela negara,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

“Selama ini, wawasan kebangsaan cenderung ditempatkan dalam bingkai ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Buku ini hadir untuk menawarkan perspektif berbeda: bahwa seluruh disiplin ilmu dan ranah kehidupan—dari sains hingga seni, dari alam hingga kebudayaan—dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan kewargaan.”

Buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik. Dalam mengajarkan ilmu apa pun, kontekstualisasi dengan potensi dan realitas keindonesiaan hendaknya selalu disisipkan, sehingga peserta didik dapat menautkan kecintaan pada ilmu dengan kecintaan pada tanah air—sebagai satu tarikan nafas yang utuh. Buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia” ini benar-benar laris-manis. Boleh dibilang sebagai Book of the Year 2025. Dalam tempo sekejap setelah sepekan peluncurannya, edisi pertama telah terjual (terpesan) seluruhnya, dan sudah dicetak edisi kedua. Dapat diperoleh di toko-toko buku Gramedia terdekat, atau dapat dipesan melalui saudara Hiton: **+628122303733**



TESTIMONI

BUKU “APA JADINYA DUNIA TANPA INDONESIA?: EPOS SUMBANGSIH CERLANG NUSANTARA SEBAGAI PANDU MASA DEPAN”

Bertepatan dengan peringatan HUT Aliansi Kebangsaan pada tanggal 29 Oktober 2025 lalu, telah diluncurkan buku yang ditulis cendekiawan yang juga pakar Aliansi Kebangsaan, Sdr. Yudi Latif, dengan judul: “Apa Jadinya Dunia tanpa Indonesia?: Epos Sumbangsih Cerlang Nusantara sebagai Pandu Masa Depan”. Dengan pengisahan atau narasi yang sangat mengalir, buku yang lahir dari wacana ilmiah ini berhasil mengungkapkan berbagai potensi, kekuatan, kemampuan dan kejayaan Indonesia serta signifikansinya bagi dunia.

Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, mengatakan, sejak awal Aliansi Kebangsaan sangat mendukung dan berusaha memfasilitasi ikhtiar penulisan buku ini, sekurang-kurangnya karena tiga alasan, yaitu: (1) Belum pernah ada buku yang ditulis untuk mengungkap tentang signifikansi Indonesia bagi dunia dengan cakupan isu dan bidang yang begitu luas serta multidisiplin seperti buku ini; (2) Penulisan buku ini didasari oleh visi besar Yudi Latif untuk membawa Indonesia kembali ke panggung dunia, agar menjadi pemimpin peradaban global di masa depan; (3) Buku ini sangat relevan dengan upaya merawat kebangsaan Indonesia melalui “*nation building*” di tengah hiruk pikuk dinamika perkembangan zaman, yang selama ini terus diperjuangkan oleh Aliansi Kebangsaan.

Diharapkan, “Buku ini dapat membuka cakrawala baru dengan perspektif yang berbeda bagi pembaca untuk memahami sejarah panjang



Karya Yudi Latif

kealaman, kemanusiaan, dan peradaban Nusantara dan signifikansinya bagi dunia. Buku ini dapat membantu kita untuk terus belajar menjadi merdeka, mengenali diri, menjaga martabat, dan menghilangkan perbudakan jiwa peninggalan penjajah yang masih tersisa sampai saat ini. Kita terlalu lama mengalami apa yang disebut hegemoni peradaban kolonialisme.”

Begitu beredar, buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?” mendapat perhatian begitu luas dari para pembaca, disertai berbagai komentar, antara lain dari:

1

Prof. Brian Yulianto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi/Kepala Badan Industri Mineral

Indonesia bukan sekadar wilayah di peta dunia, tetapi simpul penting dalam jejaring peradaban umat manusia. Sejak masa purba, tanah, laut, dan langit Nusantara telah menjadi ruang

pertemuan berbagai arus pengetahuan—dari geologi dan oseanografi, hingga seni, arsitektur, dan peradaban maritim. Dari kekayaan hayati dan mineralnya, dari falsafah Pancasila hingga semangat Konferensi Asia Afrika, Indonesia terus menegaskan satu pesan utama: dunia akan kehilangan banyak hal jika kehilangan Indonesia.

Buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?” ini mengajak kita menelusuri kembali mosaik kontribusi bangsa ini bagi dunia, melalui sains, budaya, dan nilai kemanusiaan yang luhur. Yudi Latif menulis dengan ketelitian seorang peneliti dan keindahan seorang sastrawan, menampilkan bahwa setiap lapisan geologi, setiap naskah kuno, setiap rempah dan jamu, bahkan setiap bahasa yang kita ucapkan, adalah bagian dari kontribusi besar Nusantara terhadap peradaban global.

Sebagai bangsa yang tengah melangkah menuju Indonesia Emas 2045, kita perlu menatap masa depan dengan kesadaran historis yang kuat: bahwa signifikansi Indonesia di masa depan harus setara, bahkan melampaui, signifikansinya di masa lalu. Di sinilah pendidikan tinggi, sains, dan teknologi memainkan peran strategis. “Diktisaintek Berdampak” bukanlah sekadar semboyan, melainkan gerakan untuk menyalakan kembali obor kontribusi bangsa, agar ilmu pengetahuan yang tumbuh di tanah air tidak berhenti di laboratorium, tetapi memberi manfaat bagi kemanusiaan.

Saya berharap buku ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Indonesia bukan hanya relevan, tetapi diperlukan dunia. Dan tidak ada alasan sedikitpun bagi para ilmuwan, intelektual, dan cendekiawan Indonesia untuk merasa kecil di tengah percaturan global. Sebaliknya, kita harus berdiri tegak—melanjutkan epos sumbangsih cerlang Nusantara sebagai pandu masa depan umat manusia.

Selamat menikmati karya gemilang ini, sebuah refleksi, sekaligus ajakan untuk percaya pada kebesaran bangsa kita sendiri.

2

Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

“Buku ini tidak hanya memberikan perspektif baru, tetapi juga menyadarkan pembaca akan budidaya adiluhung Indonesia.” Saudara Yudi Latif mampu menghadirkan gagasan dan nilai-nilai budaya Indonesia luhur dengan jernih dan bahasa yang mudah dipahami.

3

Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI

“Dengan kejernihan nalar dan narasi yang mengalir, buku ini menegaskan bahwa peradaban global tidak akan tegak tanpa kontribusi Indonesia, sembari menggali api inspirasi dari masa lalu untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih bermartabat dan berkeadilan. Sebuah buku yang ditulis tepat waktu, dan patut dibaca oleh para pandu Republik.” Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara Yudi Latif atas dedikasinya yang tidak pernah surut mengobarkan semangat kebangsaan dan kecintaan pada bangsa dan negara. Semoga segala jerih payah menjadi lentera bagi generasi yang akan datang.

4

Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri

“Buku ini merenggut kita dari keriuhan hari ini, memaksa kita membaca Indonesia di ruang hening, tentang makna eksistensi suatu bangsa”. Sebuah buku yang mesti dibaca oleh politisi dan pemimpin bangsa ini.

5

Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers Indonesia

Tulisan Yudi Latif selalu menghentakkan pikiran, menggugah imajinasi pembacanya untuk berpikir melewati batas teks. Buku ini membangunkan kesadaranku betapa besar dan strategisnya Indonesia bagi dunia dengan beragam aset yang dimilikinya. Sebuah bangsa besar, namun seringkali dipimpin oleh politisi dan penguasa yang berpikiran kerdil, berpandangan miopik, yang sibuk mengejar kepuasan sesaat.

6

Siswono Yudo Husodo, Pengusaha Nasional, Menteri Transmigrasi (1993-1998)

Saya sudah baca buku “Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia. Sangat bagus dan amat dibaca oleh pimpinan pemerintahan (terutama presiden, Bappaenas, Pimpinan DPR dan partai-partai), untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, berperadaban tinggi. Indonesia memiliki segala yang diperlukan untuk itu. Selamat dan sukses.

7

Fachry Ali, Peneliti Sejarah

“Junior saya Yudi Latif mengirimkan karyanya berjudul ‘Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia?’ Sebuah judul yang menimbulkan rasa penasaran. Kepenasaran itu sedikit menurun setelah menyimak daftar isi buku setebal lebih dari 700 halaman ini. Yang dimaksud dengan judul tersebut adalah sumbangan apa yang ada di Indonesia dan pengalaman sejarah Indonesia bagi ‘dunia’. Ada flora, fauna, kekayaan ekstraktif sampai pada apa yang disebut Yudi sebagai ‘kerajaan-kerajaan agung’, yang pernah tumbuh di Indonesia. Yang menarik di sini adalah pandangan Yudi Latif bahwa bahkan keterjajahan Indonesia di bawah kaum kolonial (Barat maupun Asia). Harus saya akui, Yudi adalah penulis dengan kekuatan daya maksimal. Tiap bukunya tak ada yang tipis. Karyanya tentang Pancasila yang pernah saya bahas menambah pengetahuan dan kesadaran saya. Dengan menggunakan pandangan sosiolog Robert Bella, Yudi mengatakan bahwa Pancasila adalah ‘*public religion*’ (agama publik). Terimakasih Yudi. kegigihanmu dalam berkarya membuat saya semakin iri.”

8

Gufran A. Ibrahim, Guru Besar Antropolinguistik Universitas Khairun

“Bagi saya, buku berseri Yudi Latif benar-benar merangkum semesta Indonesia sekaligus memberi kompas agar Indonesia terus lurus mengikuti kembara bangsanya mencapai negara paripurna.”

9

Irman Gusman, Ketua DPD RI

“Kehadiran buku ini menjadi energi positif, yang membangkitkan kembali kesadaran historis dan identitas keindonesiaan di tengah informasi kurang tepat terhadap sumbangsih Indonesia di kancah dunia.”

10

I Dewa Putu Rai, Pakar Aliansi Kebangsaan

“Ini memang karya luar biasa Kang Yudi Latif. Berbagai fakta dan informasi dalam buku ini juga sangat bermanfaat bagi pengembangan geo-politik, geo-strategi, *defense diplomacy*, bahkan sistem keamanan nasional Indonesia.”

11

Dhitta Puti Sarasvati, Ketua Bajik-Gernastastaka

“Sebagai orang yang berlatar belakang teknik (meski pindah ke pendidikan matematika) saya excited banget ada buku tentang buku wawasan kebangsaan dari perspektif IPA. Aku baru baca bab pertama yang geologi dan itu menarik banget”.

Cakrawala Kebangsaan

Selamat Hari
NATAL

DAN TAHUN BARU 2026





Cakrawala Kebangsaan

RUMAH BESAR CENDEKIAWAN

Vol. 1 No 2 | Desember 2025

Alamat Sekretariat :

Residence 2 Lt. 2 Komplek Hotel Sultan Jl. Gatot
Subroto, Jakarta 10270
Telp : 021-5704632/33
Email : kontak@aliansikebangsaan.org
Website : www.aliansikebangsaan.org

